SALINAN

BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang:

a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat;
b. bahwa sumber keuangan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah ditujukan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 dan Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyatakan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah yang ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-d aerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karangasem.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan, menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karenajual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
16. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya

disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dari/atau Bangunan.
22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,

menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
38. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
42. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
43. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
44. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
45. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
46. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD

adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

49. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif barupa bunga dan/atau denda.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
54. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
55. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
56. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
57. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
58. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah atau Surat Keputusan Pembetulan.
59. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan

oleh Wajib Pajak.

60. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Retribusi Daerah.
62. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak dan Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
63. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
64. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
65. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
66. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
67. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
68. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
69. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
70. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
71. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
75. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
76. Sistemadalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time.*
77. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
78. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah persetujuan penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
79. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

BAB II
PAJAK

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

(1) Pajak yang dipungut oleh Daerah terdiri atas:
   a. PBB-P2;
   b. BPHTB;
   c. PBJT terdiri atas:
      1. makanan dan/atau minuman;
      2. tenaga listrik;
      3. jasa perhotelan;
      4. jasa parkir; dan

5. jasa kesenian dan hiburan.

d. Pajak Reklame;
e. PAT;
f. Pajak MBLB;
g. Opsen PKB; dan
h. Opsen BBNKB.

(2) Jenis Pajak yang tidak dipungut oleh Daerah yakni Pajak Sarang Burung Walet.

(3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut oleh Daerah karena potensinya kurang memadai.

Pasal 3

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
a. PBB-P2;
b. Pajak Reklame;
c. PAT;
d. Opsen PKB; dan
e. Opsen BBNKB.

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
a. BPHTB;
b. PBJT atas:
1. makanan dan/atau minuman;
2. tenaga listrik;
3. jasa perhotelan;
4. jasa parkir; dan
5. jasa kesenian dan hiburan; dan
c. Pajak MBLB.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Pasal 4

(1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor pemerintah Provinsi Bali, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor

penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;

b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata- mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu *(Mass Rapid Transit),* lintas raya terpadu *(Light Rail Transit),* atau yang sejenis;
h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

(1) Subjek Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(2) Wajib Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga)

tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

(6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

(2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
   a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
   b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
   c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.

(3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
   a. untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun; dan
   b. untuk NJOP diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun.

(2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen).

Pasal 9

(1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.

(3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

(4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

(5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:

a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan
b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 10

(1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pemindahan hak karena:
        1. jual beli;
        2. tukar-menukar;
        3. hibah;
        4. hibah wasiat;
        5. waris;
        6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
        7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
        8. penunjukan pembeli dalam lelang;
        9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
        10. penggabungan usaha;
        11. peleburan usaha;
        12. pemekaran usaha; atau
        13. hadiah; dan
    b. pemberian hak baru karena:
        1. kelanjutan pelepasan hak; atau
        2. di luar pelepasan hak.
(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. hak milik;
    b. hak guna usaha;
    c. hak guna bangunan;
    d. hak pakai;
    e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
    f. hak pengelolaan.
(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu PerolehanHak atas Tanah dan/atau Bangunan:
    a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintahan Daerah,penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
    b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

(1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

(1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.

(2) Nilai perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a. harga transaksi untuk jual beli;
b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

(4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

(5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

(1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

(2) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri ditetapkan tarif sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 14

(1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
   a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
   b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
   c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
   d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
   e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak

untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan

g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

(3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

(4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:

a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau

b. jumlah BPHTB kurang bayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

(5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

(6) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:

a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau

b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan

b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 17

(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:
a. Makanan dan/atau Minuman;
b. Tenaga Listrik;
c. Jasa Perhotelan;
d. Jasa Parkir; dan
e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
   a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
   b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
      1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
      2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
      3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/ atau Minuman:
   a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas Rp.7.500.000,-

(tujuh juta lima ratus ribu rupiah)setiap bulan;
b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat *(lounge)* pada bandar udara.

Pasal 20

(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b yaitu penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.
(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, pemerintahan daerah dan penyelenggara negara lainnya;
b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/ pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
a. hotel;
b. hostel;
c. vila;
d. pondok wisata;
e. motel;
f. losmen;
g. wisma pariwisata;
h. pesanggrahan;
i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage;*
j. tempat tinggal pribadi yang difungsika sebagai hotel; dan
k. glamping.
(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan dengan tujuan tidak mencari keuntungan;

d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet).*
(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Daerah;
b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
c. kontes kecantikan;
d. kontes binaraga;
e. pameran;
f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
h. permainan ketangkasan;
i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat /ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
(2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk:
a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

(1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
(2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan

penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 25

(1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
   a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atasMakanan dan/atau Minuman;
   b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas TenagaListrik;
   c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
   d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atasJasa Parkir;
   e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT ataskesenian dan hiburan.
(2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
(3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
(4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

(1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
   a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
   b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
(2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
   a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
   b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
(3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
   a. kapasitas tersedia;
   b. tingkat penggunaan listrik;

c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap dan spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
(3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
(2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
(3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau Konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame
Pasal 29

(1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.

(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
b. Reklame kain;
c. Reklame melekat/stiker;
d. Reklame selebaran;
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
f. Reklame udara;
g. Reklame apung;
h. Reklame film/*slide;* dan
i. Reklame peragaan.

(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yaitu:
a. penyelenggaraan Reklame melalui intemet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, atau Pemerintah Daerah; dan
e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

(1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
(2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
(4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksudpada ayat (3)

ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
(2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
(3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
(4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5
Pajak Air Tanah

Pasal 34

(1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
    a. keperluan dasar rumah tangga;
    b. pengairan pertanian rakyat;
    c. perikanan rakyat;
    d. petemakan rakyat; dan
    e. keperluan keagamaan.

Pasal 35

(1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

(1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
(3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

(4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor- faktor berikut:
a. jenis sumber air;
b. lokasi sumber air;
c. tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air;
d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
e. kualitas air; dan
f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

(1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
(2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 39

(1) Objek Pajak MBLB yaitu kegiatan pengambi1an MBLB yang meliputi:
a. asbes;
b. batu tulis;
c. batu setengah permata;
d. batu kapur;
e. batu apung;
f. batu permata;
g. bentonit;
h. do1omit;
i. *feldspar;*
j. garam batu *(halite);*
k. grafit;
l. granit/andesit;
m. gips;
n. kalsit;
o. kaolin;

p. leusit;
q. magnesit;
r. mika;
s. marmer;
t. nitrat;
u. obsidian;
v. oker;
w. pasir dan kerikil;
x. pasir kuarsa;
y. perlit;
z. fosfat;
aa. talk;
bb. tanah serap *(fullers earth);*
cc. tanah diatom;
dd. tanah liat;
ee. tawas *(alum);*
ff. tras;
gg. yarosit;
hh. zeolit;
ii. basalt;
jj. trakhit;
kk. belerang;
ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan;
b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah: dan
c. untuk keperluan sosial dan keagamaan yang tidak diperjual belikan.

Pasal 40

(1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
(2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.

(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

(1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
(2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saatterjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
(3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 44

Objek Opsen PKB dikenakan atas pajak terutang PKB.

Pasal 45

(1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
(2) Opsen PKB dipungut secara bersamaan dengan PKB.

Pasal 46

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 47

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 48

(1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
(2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
(3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah

Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 8
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 49

Opsen BBNKB yaitu Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 50

(1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
(2) Opsen BBNKB dipungut secara bersamaan dengan BBNKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran BBNKB terutang.

Pasal 53

(1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
(2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
(3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 54

(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

(3) Masa pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahunbuku yang tidak sama dengan tahun kalender.
(5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dalamPeraturan Bupati.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 55

(1) Jenis Retribusi terdiri atas:
a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.
(2) Objek Retribusi merupakan penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
(4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar Retribusi atas layanan yang digunakan/ dinikmati.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 56

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a meliputi:
a. pelayanan kesehatan;
b. pelayanan kebersihan;
c. pelayanan pasar; dan
d. pelayanan parkir di tepi jalan umum.
(2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
   b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
   c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

(7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.

(8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

(9) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 57

(1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, rumah sakit pratama, dan laboratorium kesehatan Daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 58

(1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
   a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
   b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 59

(1) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran/hamparan/dasaran/jongko, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 60

(1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 61

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
c. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
d. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

(3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 62

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 63

(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan tarif Retribusi.
(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
(5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 64

(1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b meliputi:
   a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
   b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
   c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

(7) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.

(8) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

(9) Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yahng dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 65

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

(1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
    a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
    b. kerja sama pemanfaatan;
    c. bangun guna serah atau bangunan serah guna; atau
    d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

Pasal 71

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan

jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
   a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
   b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
   c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
   d. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
   e. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis laynan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian aset Daerah.

Pasal 72

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 73

(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan tarif Retribusi.
(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
(5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 74

(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c meliputi:
   a. PBG; dan
   b. penggunaan tenaga kerja asing.
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
(4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 75

(1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
(3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
   a. pembangunan baru;
   b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
   c. PBG perubahan untuk:
      1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
      2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
      3. perubahan luas Bangunan Gedung;
      4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
      5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
      6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
      7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
      8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

(4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pemberian PBG untuk bangunan:
a. milik pemerintah;
b. milik Pemerintah Daerah;
c. milik pemerintah Provinsi Bali;
d. bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan; dan
e. bangunan yang memiliki fungsi sosial budaya antara lain balai *banjar*, balai pertemuan masyarakat, dan balai *subak*.

Pasal 76

(1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di lokasi dalam satu Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
(2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 77

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
(3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. formula untuk bangunan gedung, meliputi:
   1. luas total lantai;
   2. indeks lokalitas;
   3. indeks terintegrasi; dan
   4. indeks bangunan gedung terbangun,
b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
   1. volume;
   2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
   3. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 78

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. biaya penerbitan dokumen izin;
    2. pengawasan;
    3. penegakan hukum;
    4. penatausahaan; dan/atau
    5. biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
(3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 79

(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dengan tarif Retribusi.
(2) Khusus untuk Retribusi Perizinan tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
(3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
    b. HSPBG untuk Prasarana Banghunan Gedung.
(4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
(5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
(6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.

(9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan bangunan gedung negara/ standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.

(10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 80

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.

(3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pasal 81

(1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:

a. pendafatarn dan pendataan;
b. penetapan besaran Pajak dan Retribsui terutang;
c. pembayaran dan penyetoran;
d. pelaporan;
e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan
f. ketetapan;
g. pemeriksaan Pajak;
h. penagihan Pajak dan Retribusi terutang;
i. keberatan;
j. gugatan;
k. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan

l. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 82

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPDdengan benar dan lengkap serta melampirkan keterangan yangbenar.
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
(5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
(6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 83

(1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
(3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
(4) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 84

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
(2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling larna 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
(3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
(4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Bagian Ketiga
Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi, dan/atau Sanksinya

Paragraf 1
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 85

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
    a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
    b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
    c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra

mikro;

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapaiprogram prioritas Daerah; dan/atau
e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 86

(1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

(2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 87

(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.

(2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif liskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 88

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

(2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

(3) Kondisi objek Pajak atau Objek Retribusi sebagiamana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
   a. lahan pertanian yang sangat terbatas;
   b. tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu;
   c. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu; dan
   d. nilai Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara dan/atau kerusuhan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 89

(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
   a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
   b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

(7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
   a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
   b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
   c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
   a. bencana alam;
   b. kebakaran;
   c. kerusuhan massal atau huru-hara;
   d. wabah penyakit; dan/ atau
   e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN HASIL PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 90

(1) Hasil penerimaan Opsen PKB, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
(4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
    a. penanaman pohon;
    b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
    c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
    d. pengelolaan limbah.
(5) Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pemerintah menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan Pajak tersebut.
(6) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 91

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelengaraan pelayanan yang bersangkutan.
(2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang mengenai BLUD.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 92

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi.
(2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
    a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
    b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
(3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 93

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-perundangan.

BAB VI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 94

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
    a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
    b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau

instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 95

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pajak dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak Daerah dan Retribusi;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Pidana

Pasal 96

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 98

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 99

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Pasal 98, dan Pasal 99 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 101

(1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undnagan bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 102

(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
(4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    a. bencana alam;
    b. kebakaran;
    c. kerusuhan massal atau huru-hara;
    d. wabah penyakit; dan/atau
    e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 104

Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 105

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 106

Ketentuan mengenai Pajak MBLB dalam Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai dengan 5 Januari 2025.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
c. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);

d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
e. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
f. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9);
g. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10);
h. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12);
i. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13);
j. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14);
k. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
l. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
m. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17);
n. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18);
o. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19);
p. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20);
q. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun

2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 21);

r. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22);

s. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

t. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);

u. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);

v. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);

w. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12);

x. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14);

y. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);

z. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);

aa. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);

bb. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

cc. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);

dd. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);

ee. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13);

ff. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14);

gg. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);

hh. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);

ii. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);

jj. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem *Online* Pajak Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);

kk. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);

ll. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);

mm. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi

Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);

nn. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);

oo. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);

pp. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Amlapura Timur dan Pasar Se- Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 4);

qq. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Tarif Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 4);

rr. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 9);

ss. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 4);

tt. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016tentangPerubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Amlapura Timur Dan Pasar se-Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 6);

uu. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 24);

vv. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 23);

ww. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Amlapura Timur dan Pasar Se-Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 5); dan

xx. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 49),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem

Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8); dan

b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 109

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI: (8, 85/2023).

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,

I Komang Suarnatha
NIP. 19821108 200501 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memegang peran penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Sebagai sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah, maka Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi salah satu sektor penting yang perlu Diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, khususnya menyikapi ketentuan Pasal 94 yang menyatakan bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Kondisi eksisting regulasi di Kabupaten Karangasem mencerminkan bahwa terdapat beberapa ketentuan peraturan yang bergerak di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah secara terpisah. Namun, mengikuti nafas panjang politik pembangunan hukum di Indonesia yang diawali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan arah politik hukum penyederhanaan regulasi dalam 1 (satu) Perda. Penyederhanaan tersebut juga dilakukan dengan penyesuaian-penyesuaian dinamika regulasi sebagaimana dibawa oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Secara sederhana maka dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Daerah dalam hal ingin memungut Pajak dan Retribusi perlu melakukan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan perkembangan regulasi baik di sektor Undang-Undang hingga Putusan Mahkamah Konstitusi. Memaknai dinamika regulasi tersebut, upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam tingkat Peraturan Daerah di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi hal yang vital untuk dilaksanakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan" adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahan perkebunan, perhutanan dan pertambangan di tanah yang diberikan hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan" adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan,halini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanah pelaba pura yang dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan seperti dikontrakkan kepada investor, digunakan sebagai tempat usaha dan lain-lain dikenakan pajak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan subjek pajak sebagai wajib pajak yang secara nyata memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau Bangunan apabila suatu objek pajak belum jelas wajib pajaknya.

Contoh:

a. subjek pajak bangunan A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan milik orang lain bernama B bukan karena suatu hak berdasarkan Undang-Undang atau bukan karena perjanjian maka dalam hal demikian A yang memanfaatkan atau menggunakan Bumi dan/atau Bangunan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak. Dengan ketentuan Bumi dan bangunan milik orang lain bernama B tersebut belum pernah terdaftar sebagai objek pajak bumi dan bangunan.
b. Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan dalam pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
c. Subjek pajak dalam waktu yang lama berada diluar wilayah letak objek pajak, sedang untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan pada orang atau badan, maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai wajib pajak.

Penunjuk sebagai wajib pajak oleh Pemerintah Daerah bukan merupakan bukti pemilikan hakatas Bumi dan/atau Bangunan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Dalam hal terjadi perkembangan pembangunan yang mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Perbedaan pengenaan tarif didasarkan atas nilai ekonomis yang diberikan atas kepemilikan bumi dan bangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan

melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y. Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Angka 5

Perolehan karena waris adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Angka 6

Yang dimaksud dengan pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah pengalihan hak atas tanah dan bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.

Angka 7

Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.

Angka 8

Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagiamana tercantum dalam Risalah Lelang.

Angka 9

Sebagai pelaksanaan dari keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum

sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut.

Angka 10

Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.

Angka 11

Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.

Angka 12

Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.

Angka 13

Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.

Angka 2

Yang dimaksud dengan pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Huruf a

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Huruf b

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan

mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Huruf d

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewamenyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat peseorangan yang terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.

Huruf f

Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan panggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum adalah tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah dan kegiatan yang semata-mata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, misalnya, tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk instansi pemerintah, rumah sakit pemerintah, jalan umum.

Huruf c

Badan atau perwakilan organisasi internasional yang dimaksud dalam Pasal ini adalah badan atau perwakilan organisasi internasional, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-Undang Pokok Angraria, termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah.
Contoh :

i. Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik tanpa terjadi perubahan nama
ii. Bekas tanah hak milik adat (dengan bukti surat Girik atau sejenisnya menjadi hak baru).

Yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain misalnya memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama. Contoh Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB), yang dilaksanakan baik sebelum maupun setelah barakhirnya HGB.

Huruf f

Yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum orang pribadi atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak milik tanah dan atau bangunan dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah harga yang terjadi dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh : Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (harga transaksi) Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan

tersebut yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), maka yang dipakai sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan bukan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris termasuk suami/istri" adalah hubungan sedarah antara bapak dan/atau ibu dengan anak atau sebaliknya, tidak termasuk hubungan saudara kandung.

Yang dimaksud "suami/istri" adalah hubungan suami/istri yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa penunjang lainnya

bagi umum yang dikelola secara komersial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan hostel adalah penginapan sederhana dimana dalam satu ruangan terdapat dua atau lebih ranjang susun seperti asrama dan fasilitas yang disediakan untuk digunakan bersama seperti kamar mandi, ruang TV, area duduk atau kerja.

Huruf c

Yang dimaksud dengan vila adalah rumah indah yang menyediakan fasilitas seperti hotel atau penginapan yang ditempati oleh orang yang bukan pemiliknya yang dikelola secara komersial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pondok wisata adalah usaha akomodasi jasa pelayanan penginapan bagi umum yang dilakukan perorangan dengan menggunakan sebagian dari tempat tinggalnya (dengan pembayaran harian).

Huruf e

Yang dimaksud dengan motel adalahtempat penginapan yang biasanya dirancang untuk para pelanggan uang melakukan perjalanan melalui darat (mobil) dan berada ditengah-tengah antara dua kota.

Huruf f

Yang dimaksud dengan losmen adalah sejenis penginapan komersial yang menyewakan kamar tanpa menyediakan fasilitas makan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan wisma pariwisata adalah bangunan atau tempat tinggal, kantor atau kumpulan rumah, kompleks perumahan dan pemukiman yang dikomersialkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pesanggrahan adalah rumah peristirahatan atau penginapan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage* adalah sebuah bangunan penginapan yang bentuknya seperti rumah satu lantai dengan atap miring, bentuknya kecil dan memiliki teras.

Huruf j

Yang dimaksud dengan tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel adalah rumah milik pribadi tempat peristirahatan yang dikomersialkan (disewakan).

Huruf k

Yang dimaksud dengan glamping adalah suatu bentuk perkemahan modern dengan menggabungkan esensi alam dan dengan adanya fasilitas yang memadai, seperti

tempat tidur yang nyaman, listrik, air hingga bak air panas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang termasuk dalam permainan ketangkasan antara lain: *parasailing, bungy jumping,* motor ATV (*off road*), dan lainnya.

Huruf i

Yang termasuk dalam olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaranantara lain: *Fittness center, futsal,* bulutangkis, *bilyard,* sanggar senam, dan lainnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan rekreasi wahana air adalah tempat rekreasi yang menampilkan tempat bermain dengan air sebagai objek utamanya seperti: *rafting, diving, snorkeling,* kolam renang, kolam air mancur, air terjun, wisata selam, *waterboom,* jet ski, *dive walking, fly board, hoverboard, seabob,* dan aktifitas olahraga air lainnya.

Yang dimaksud dengan wahana ekologi adalah tempat yang menyajikan hiburan lingkungan alam, flora dan fauna seperti: taman bunga, taman air, Rumah Pohon, taman hutan, dan pesona alam lainnya.

Yang dimaksud dengan wahana pendidikan adalah tempat rekreasi yang dijadikan sebagai sarana penyebarluasan dunia pendidikan.

Yang dimaksud dengan wahana budaya adalah tempat yang menyajikan hiburan yang berhubungan dengan agama, adat budaya, kesenian, dan peninggalan sejarah seperti: Taman

Sukasada Ujung, Desa Tenganan, Panorama Bukit Lempuyang, dan lainnya.

Yang dimaksud dengan wahana salju adalah tempat rekreasi yang bertemakan salju.

Yang dimaksud dengan wahana permainan pemancingan adalah area pemancingan yang dipergunakan sebagai tempat rekreasi.

Yang dimaksud dengan Agrowisata adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian perkebunan, atau fasilitas terkait yang menjadi daya tarik bagi wisatawan seperti Kebun Salak dan lainnya.

Yang dimaksud dengan kebun binatang adalah tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan dan dipertunjukkan kepada publik.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan:

- reklame papan / *bilboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu seng, tinplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar
- reklame *videotron/megatron* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor dengan visualisasi berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah. terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik, termasuk di dalamnya elektronik *display, light*

emittingdiode (LED) dan reklame teks berjalan (*running text*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, *banner, giant banner* dan *standing banner.*

Huruf c

Yang dimaksud dengan reklame melekat/stiker adalah reklame yang berbentuk tulisan, gambar atau lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditulis, ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda, termasuk di dalamnya adalah reklame grafiti.

Huruf d

Yang dimaksud dengan reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leafleat dan reklame dalam undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.

Huruf h

Yang dimaksud dengan reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau 16 film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan kata-kata disertai gerakan yang bertujuan memperagakan suatu produk.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan adalah bangunan gedung beserta sarana pendukungnya yang berada dalam satu areal dengan batas-batas tertentu yang dimiliki atau dikuasai oleh orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha atau penyelenggaraan profesi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

198

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Contoh Penghitungan Besaran pokok Opsen PKB yang terutang:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
   a. BBNKB terutang = 8% x Rp 300 juta = Rp 24 juta
   b. Opsen BBNKB terutang = 66% x Rp 24 juta = 16 juta

   Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.
2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
   a. PKB terutang = 1% x Rp 300 juta = Rp 3 juta
   b. Opsen PKB terutang = 66% x Rp 3 juta = Rp 2 juta

   Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak yaitu:

a. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
   1. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
   2. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
   3. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
b. Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
c. Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Perkada dapat dilakukan

sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
   1. 1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
   1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Daerah menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:

Perkada:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
   1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
   1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
      1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
      1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang termasuk "pelayanan administrasi" antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan, dimana untuk pelayanan administrasi tidak dikenakan Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tempat umum lainnya" adalah tempat

yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Perkada dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
   1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
   1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Karangasem menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:

Perkada:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
   1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
   1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing
      I.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan
      1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Khusus untuk pelyanan tempat olahraga yang dipergunakan untuk pendidikan, pembibitan, pembinaan dan pelatihan olahraga tidak termasuk dalam objek retribusi.

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Balai *Banjar*" adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi sosial dan budaya pada

masyarakat adat di Bali yang dijadikan sebagai tempat atau pusat berbagai kegiatan, dimana masyarakat Bali bisa saling bertemu (*sangkep*) untuk membahas masalah lingkungan seperti aturan atau larangan pada lingkungan *banjar*, upacara keagamaan, pentas kesenian dan segala aktivitas yang dibutuhkan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "Balai *Subak*" adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi sosial dan budaya bagi organisasi tradisional dibidang tata guna air dan/atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kedaluwarsa penetapan" adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh: Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di suatu daerah pada bulan Juni 2025, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni 2025 yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli 2025 untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 September 2025 untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di Daerah tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Contoh: Wajib Pajak memiliki Pajak terutang sebesar Rp.100.000.000,00. untuk masa Pajak April 2O25 yang disetujui oleh Bupati pada tanggal 5 Mei 2025 untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 2O25 dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

a. pembayaran angsuran pertama tanggal l Juni 2025 = Rp 25.000.000,00
   Sanksi Administratif: Rp60O.OO0,00
   (Rp 100.000.000,00 x 0,6%)
b. pembayaran angsuran kedua tanggal I Juli 2025 = Rp 25.000.000,00
   Sanksi Administratif Rp450.000,00
   (Rp 75.000.000,00 x 0,6%)
c. pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2025 = Rp 25.000.000,00
   Sanksi Administratif: Rp300.000,00
   (Rp 50.000.000,00 x 0,6%)
d. pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September 2025= Rp 25.000.000,00

Sanksi Administratif Rp150.000,00
(Rp 25.000.000,00 x 0,6%)

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang termasuk "penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum" yaitu pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM

I. PELAYANAN KESEHATAN

A. Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah

No	Jenis Layanan	Tarif Retribusi (Rp.)
A	**Pemeriksaan Hematologi**	
1	Darah Lengkap (DL)	55.000
2	Golongan Darah	15.000
3	Hapusan Darah Tepi	45.000
4	Hitung Jumlah Eosinofhil	15.000
5	Hitung Jumlah Retikulosit	15.000
6	Hitung Jumlah Trombosit	15.000
7	Hitung Jumlah Leukosit	15.000
7	LED	22.000
8	Waktu Pembekuan (CT)	15.000
9	Waktu Pendarahan (BT)	15.000
10	Waktu Retraksi Bekuan (APTT)	95.000
11	Waktu Retraksi Bekuan (PTT)	95.000
12	Hematokrit	6.000
13	Hemoglobin (Hb)	20.000
14	LE cell	40.000
B	**Kimia Klinik**	
1	Albumin	29.000
2	Alkali Phospatase	35.500
3	Bilirubun direct	27.000
4	Bilirubun total	27.000
5	Cholesterol	27.000
6	Creatinin	27.000
7	Electrolit (Na, K, Cl)	98.500
8	Gamma GT	38.500
9	Globulin	25.000
10	Glukosa 2 jam PP	20.000
11	Glukosa puasa	20.000
12	Glukosa sewaktu	20.000
13	HBA1C	155.000
14	HDL-Cholesterol	50.000
15	Kalsium	27.000
16	LDL-Cholesterol	50.000
17	Protein total	29.000
18	Serum Iron (SI)	50.000
19	SGOT	25.000
20	SGPT	25.000

21	Trigliserida	28.500
22	UIBC (Unsaturated Iron Binding Capacity) / TIBC (Total Iron	60.000
23	Ureum	27.000
24	Uric Acid	25.000
C	**Pemeriksaan Mikrobiologi dan Parasitologi**	
1	Aeromonas sp	40.000
2	Analisis Sperma	80.000
3	Angka kuman (colony	45.000
4	Bacillus aereus	40.000
5	Bakteriologi air (MPN)	95.000
6	Cacing / Telur cacing	35.000
7	Darah samar/benzidine	40.000
8	Faeces Lengkap	25.000
9	Gram Preparat	25.000
10	Jamur preparat	25.000
11	Legionella sp.	1.000.000
12	Liquor CerebroSpinalis (LCS) 6	105.000
13	Malaria preparat	30.000
14	Mikro Filaria	20.000
15	Mycobacterium Leprae (BTA)	25.000
16	Mycobacterium Tubercoluse	25.000
17	Pemeriksaan Angka Kuman	175.000
18	Pemeriksaan Makanan dan	115.000
19	Pemeriksaan Nosokomial	175.000
20	Pemeriksaan Rectal Swab	95.000
21	Pemeriksaan Usap Alat Makan	115.000
22	Pemeriksaan Usap Alat OK	125.000
23	Pemeriksaan Usap Tangan	115.000
24	Swab/Secret Vagina	32.000
25	Tes kepekaan terhadap obat	75.000
26	Tes resistensi Mycobacterium TBC terhadap obat	80.000
27	Tricomonas sp	20.000
28	Uji Sterilitas	50.000
29	Analisa Batu	80.000
30	BETA HCG (Tes Kehamilan)	35.000
31	Esbach	20.000
32	Kimia Urine (Carik Celup)	21.000
33	Protein Bence Jones	20.000
34	Sedimen	12.000
35	UL (Urine Lengkap)	25.000
36	TCM (Test Cepat Molekuler)	667.000
D	**Pemeriksaan Imunologi**	
1	Anti HAV	145.500
2	Anti HBS	70.500
3	Anti HCV (rapid tes)	95.000
4	Anti HCV (Rapid Tes)	150.000
5	Anti Streptolisis O (ASTO)	50.000

6	Candidaelisa IgG/IgM	123.500
7	Clamydireliza IgG/IgM	128.500
8	Dengue Blood (DHF) (IgM + IgG)	200.000
9	Ferritin	200.000
10	FT4	250.000
11	HAV IgG/IgM	122.000
12	HbsAg (Rapid test)	50.000
13	Herves S Elisa IgG/IgM	123.500
14	HIV	84.000
15	NSI	240.000
16	Rapid Test Covid -19	99.000
17	Rhematoid Factor (RF) B	53.000
18	RT- PCR	275.000
19	Rulalaelisa IgG/IgM	123.500
20	T3/T4 Elisa	150.000
21	Toxoplasma Elisa IgG/IgM	123.500
22	TPHA	40.000
23	TPHA (Kuantitatif)	38.500
24	TSA	150.000
25	VDRL	35.000
26	WIDAL	40.500
E	**Kimia Air, Toksikologi, dan Kimia Lingkungan**	
1	Air Raksa	100.000
2	Aldrin	155.000
3	Aluminium	51.000
4	Ammonia (NH3)	40.000
5	Antimon/Sb	51.000
6	Arsen	100.000
7	Asam Bongkrek	100.000
8	Barium	51.000
9	Bau	5.500
10	Besi	50.000
11	BOD	40.000
12	Boron	51.000
13	Calsium	30.000
14	Chlordan	75.000
15	Chlorfiretos	75.000
16	Chlorida (Cl)	20.000
17	Cholinestrase	60.000
18	Co2 Agresif	15.000
19	COD	40.000
20	Debu	30.000
21	Detergent	75.000
22	DHL Konduktiviti / Daya Hantar	8.000
23	Diazinon	155.000
24	Dieldrin	155.000
25	Diklopos	75.000
26	Emas	51.000
27	Endosulfan	75.000
28	Endrin	155.000
29	Fenitotrin	155.000
30	Fention	155.000
31	Fentoat	155.000
32	Flourida	30.000
33	Fosfat	30.000

34	Golongan Organoposphat	150.000
35	Golongan Organoklorin	150.000
36	Golongan Karbamat	150.000
37	H2S	30.000
38	Kadar Garam (NaCL)	20.000
39	Kadar lodium	42.000
40	Kadmium	51.000
41	Kalium	51.000
42	Karbamat – BPMC	75.000
43	Karbamat Carbofur	75.000
44	Karbamat Propoksur	75.000
45	KarboFenation	155.000
46	Kebasaan	15.000
47	Kebisingan	30.000
48	Kejernihan	8.000
49	Kekeruhan	15.000
50	Kesadahan (CaCO3)	27.000
51	Kobalt	51.000
52	Kromium / Total Kromium	51.000
53	Lindan	155.000
54	Magnesium	60.000
55	Malation	75.000
56	Mangan (Mn)	51.000
57	Minyak Lemak	70.000
58	Natrium	51.000
59	Nikel (Ni)	51.000
60	Nitrat (NO3)	30.000
61	Nitrit (NO2)	30.000
62	Oksigen terabsorbsi	30.000
63	Oksigen Terlarut (DO)	16.000
64	Pengukuran dengan UV	25.000
65	Pengukuran Panjang Gelombang dengan Spektrofotometer	25.000
66	Perak (Ag)	51.000
67	pH	11.000
68	Phenol	73.000
69	R a s a	5.500
70	Raksa (Hg)	100.000
71	Salinity	8.000
72	Seleneium	85.000
73	Seng / Zink	51.000
74	Senyawa aktif biru metilen	75.000
75	Sianida	100.000
76	Sisa Khlor	20.000
77	Suhu	5.500
78	Sulfat	30.000
79	Sulfida	27.000
80	TDS/Zat Padat Terlarut	30.000
81	Tembaga (Cu)	51.000
82	Timah Putih / Sn	51.000
83	Timbal (Pb)	45.000
84	TOC	85.000
85	Toxafen	100.000
86	Toxoflafin	100.000
87	TSS/Zat Padat Tersuspensi	30.000

88	Warna	22.500
89	Zat Organik (KMnO4)	25.000
90	Zat/Benda Terendap	8.000
91	Zat/Benda Terapung	8.000
F	**Kimia Pangan**	
1	Boraks	105.000
2	Formalin	105.000
3	Methanil Yellow	105.000
4	Pestisida	105.000
5	Rhodamin B	105.000
6	Sakarin	105.000
G	**Kimia Obat dan Kosmetik**	
1	Amphetamin	45.000
2	Barbiturat	45.000
3	Benzodiazepin	45.000
4	Kokain	45.000
5	Morfin	45.000
6	Tetra Hydrocanabinol	45.000

B. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pratama dan RSUD Non BLUD

No	Jenis Layanan	Tarif Retribusi (Rp.)
A	**Tarif Rawat Jalan**	
1	Rawat Jalan Medik Non Spesialis	20.000
2	Rawat Jalan Medik Spesialis	30.000
3	Medical Check Up umum	931.000
B	**Tarif Rawat Inap Per Hari**	
1	Rawat Inap	180.000
2	Rawat Inap Bayi yang baru dilahirkan di RS Pratama	90.000
3	Kelas III Umum	200.000
4	Klas III Spesialis	220.000
5	Administrasi Rawat Inap	30.000
6	Visite Dokter Umum	20.000
7	Visite Dokter Spesialis	50.000
C	**Tarif Pelayanan Gawat Darurat**	
1	Rawat Darurat Medik Umum	40.000
2	Rawat Darurat Medik Spesialis	60.000
3	Observasi < 6 jam	10.000
4	Resusitasi RJP/CPR	30.000
5	Konsultasi Dokter umum	10.000
6	Konsultasi Dokter Spesialis	20.000
D	**Tarif tindakan Medik**	
1	**Operatif**	-
a	**Dengan pembiusan Lokal**	-
	Sederhana	35.000
	Kecil	50.000

	Sedang	125.000
b	**Dengan General anastesi**	-
	1.Kecil	-
	Debridement luka	425.000
	Eksplorasi Luka	425.000
	Repair daun telinga	1.112.000
	Sirkumsisi	1.112.000
	Ekstirpasi tumor jinak kulit	775.000
	Repair tendon	1.450.000
	Reposisi gips ekstremitas atas 1 sisi	775.000
	Ekstirpasi tumor jinak kulit multiple	1.112.000
	Insisi biopsi	1.450.000
	2. Sedang	-
	Amputasi jari	1.787.500
	Vaserktomi	2.125.000
	Sistostomi	1.787.500
	Ekstraksi corpus alienum	1.787.500
	Hidrokelektomi	2.125.000
	Ekstirpasi polip recti	1.787.500
	Nefrostomi	2.125.000
	Ekstirpasi tumor jinak payudara	2.125.000
	Ekstirpasi keloid	2.125.000
	Colostomi	5.400.000
	Fistulektomi	2.800.000
	Insisi abses submandibula	775.000
	Trakeostomi	1.112.000
	Reposisi + pasang GP 2 sisi	1.787.500
	Apendiktomi	2.800.000
	Herniotomi	4.050.000
	Haemoroidektomi	4.050.000
	Intususepsi	5.400.000
	Release torsio testis	2.125.000
	Laparotomi-Eksplorasi	5.400.000
	Operasi palomo/ligasi tinggi	2.125.000
	Fasiotomi	775.000
	Orif p-s Cruris/patella	3.375.000
	Prosedur corpol tunned	1.112.000
	3.Besar	-
	Prosedur non kompleks usus halus dan usus besar	5.400.000
	Adhesiolisis ringan (peritoneal)	6.750.000
2	**Non Operatif**	-
	Sederhana	35.000
	Kecil	50.000
	Sedang	80.500
3	**Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut**	-
	Sederhana	25.000
	Kecil	50.000
	Sedang	75.000
	Berat	160.000
E	**Tarif Pelayanan Kebidanan dan Kandungan**	
1	**Persalinan Normal**	-
	Bidan	800.000
	Dokter Umum	1.000.000
	Dokter Spesialis	1.500.000

2	**Persalinan patologis**	-
	Dokter Umum	1.500.000
	Dokter Spesialis	2.500.000
3	**Curetage**	-
	Dokter Umum	1.500.000
	Dokter Spesialis	2.500.000
4	**Sectio Caesaria**	-
	Spesialis Obgyn	4.000.000
	Asisten operator	200.000
	Spesialis Anastesi	450.000
	Spesialis Anak	300.000
F	**Tarif Pelayanan Radio Diagnostik**	
1	Sheedet/Skull/Kepala/Ap/Lat	75.000
2	Schodel basis/basis crapll	75.000
3	Waters/SPN	75.000
4	Mastoid	75.000
5	Mandibula	75.000
6	Orbita	75.000
7	Os Nasal	75.000
8	Thorax AP/PA/Lat	75.000
9	BNO/BOF	75.000
10	Abdomen, 1/2 dd,LLD	75.000
11	Pelvis/Panggul	75.000
12	Servikal/Leher Ap/Lat/Obl	75.000
13	Shoulder/Bahu	75.000
14	Clavicula	75.000
15	Scapula	75.000
16	Manus AP/Lat/oblique	75.000
17	Wrist/Pergelangan tangan AP/Lat	75.000
18	Antebrachi AP/Lat	75.000
19	Cubiti AP/Lat	75.000
20	Humerus AP/Lat	75.000
21	Pedis AP/Obl	75.000
22	Angkle AP/Lat	75.000
23	Cruris AP/Lat	75.000
24	Genu AP/Lat	75.000
25	Femur Ap/Lat	75.000
26	Thoracal AP/Lat	75.000
27	Lumbal AP/Lat	75.000
28	Thoraco-Lumbal AP/Lat	75.000
29	Sacrum AP/Lat	75.000
30	Lumbu-Sacral AP/Lat	75.000
31	Coxygeus AP/Lat	75.000
32	Oenopagus	95.000
33	Intra Vena Plelografi (IVP)	375.000
34	Cystografi	300.000
35	Uretrocystografi	300.000
36	Caudografi	340.000
37	Elektroencefalografi (EEG)	600.000
38	Echokardiografi	600.000
39	Treadmill	750.000
40	CT Scan	900.000
41	USG (Dokter Umum)	95.000
42	USG (Dokter Spesialis)	185.000

G	**Tarif Penunjang Medik**	
1	EKG	50.000
H	**Tarif Pemeriksaan Laboratorium**	
I	**Patologi Klinik**	
a	**Pemeriksaan Hematologi Kategori Canggih**	-
1	Darah Lengkap (DL)	55.000
2	Golongan Darah	15.000
3	Hapusan Darah Tepi	45.000
4	Hitung Jumlah Eosinofhil	15.000
5	Hitung Jumlah Retikulosit	15.000
6	Hitung Jumlah Trombosit	15.000
7	Hitung Jumlah Leukosit	15.000
8	LED	22.000
9	Waktu Pembekuan (CT)	15.000
10	Waktu Pendarahan (BT)	15.000
11	Waktu Retraksi Bekuan (APTT)	95.000
12	Waktu Retraksi Bekuan (PTT)	95.000
13	Hematokrit	6.000
14	Hemoglobin (Hb)	20.000
15	LE cell	40.000
b	**Kimia Klinik Kategori Canggih**	
1	Albumin	29.000
2	Alkali Phospatase	35.500
3	Bilirubun direct	27.000
4	Bilirubun total	27.000
5	Cholesterol	27.000
6	Creatinin	27.000
7	Electrolit (Na, K, Cl)	98.500
8	Gamma GT	38.500
9	Globulin	25.000
10	Glukosa 2 jam PP	20.000
11	Glukosa puasa	20.000
12	Glukosa sewaktu	20.000
13	HBA1C	155.000
14	HDL-Cholesterol	50.000
15	Kalsium	27.000
16	LDL-Cholesterol	50.000
17	Protein total	29.000
18	Serum Iron (SI)	50.000
19	SGOT	25.000
20	SGPT	25.000
21	Trigliserida	28.500
22	UIBC (Unsaturated Iron Binding Capacity) / TIBC (Total Iron Binding Capasity)	60.000
23	Ureum	27.000
24	Uric Acid	25.000

II	**Bakteriologi dan Parasitologi**	
a	**Pemeriksaan Bakteriologi dan Parasitologi**	
1	Aeromonas sp	40.000
2	Analisis Sperma	80.000
3	Angka kuman (colony count/TPC)	45.000
4	Bacillus aereus	40.000
5	Bakteriologi air (MPN)	95.000
6	Cacing / Telur cacing	35.000
7	Darah samar/benzidine	40.000
8	Faeces Lengkap	25.000
9	Gram Preparat	25.000
10	Jamur preparat	25.000
11	Legionella sp.	1.000.000
12	Liquor CerebroSpinalis (LCS) 6 Parameter	105.000
13	Malaria preparat	30.000
14	Mikro Filaria	20.000
15	Mycobacterium Leprae (BTA)	25.000
16	Mycobacterium Tubercoluse /TBC (BTA)	25.000
17	Pemeriksaan Angka Kuman Ruan	175.000
18	Pemeriksaan Makanan dan Minuman	115.000
19	Pemeriksaan Nosokomial	175.000
20	Pemeriksaan Rectal Swab	95.000
21	Pemeriksaan Usap Alat Makan dan Masak	115.000
22	Pemeriksaan Usap Alat OK	125.000
23	Pemeriksaan Usap Tangan	115.000
24	Swab/Secret Vagina	32.000
25	Tes kepekaan terhadap obat	75.000
26	Tes resistensi Mycobacterium TBC terhadap obat	80.000
27	Tricomonas sp	20.000
28	Uji Sterilitas	50.000
29	Analisa Batu	80.000
30	BETA HCG (Tes Kehamilan)	35.000
31	Esbach	20.000
32	Kimia Urine (Carik Celup)	21.000
33	Protein Bence Jones	20.000
34	Sedimen	12.000
35	UL (Urine Lengkap)	25.000
36	TCM (Test Cepat Molekuler)	450.000
b	**Pemeriksaan Urine Kategori Sederhana**	
1	Darah samar/benzidine	40.000
2	Sedimen	12.000
c	**Kategori Sedang**	
1	Kimia Urine (carik celup)	21.000

2	UL (Urine Lengkap)	25.000
3	Protein Bence Jones	20.000
d	**Pemeriksaan Elektrolit Kategori Canggih**	
1	Electreolit	100.000
III	**Pemeriksaan Imunologi**	
1	Anti HAV	145.500
2	Anti HBS	70.500
3	Anti HCV (rapid tes)	95.000
4	Anti Streptolisis O (ASTO)	50.000
5	Dengue Blood (DHF) (IgM + IgG)	200.000
6	Ferritin	200.000
7	FT4	250.000
8	HbsAg (Rapid test)	50.000
9	HIV	84.000
10	NSI	240.000
11	Rhematoid Factor (RF) B	53.000
12	T3/T4 Elisa	150.000
13	TPHA	40.000
14	TSA	150.000
15	VDRL	35.000
16	WIDAL	40.500
17	Rapid Test Covid -19	275.000
18	RT- PCR	99.000
19	HAV IgG/IgM	122.000
20	TPHA (Kuantitatif)	38.500
21	Anti HCV (Rapid Tes)	150.000
22	Clamydireliza IgG/IgM	128.500
23	Candidaelisa IgG/IgM	123.500
24	Herves S Elisa IgG/IgM	123.500
25	Rulalaelisa IgG/IgM	123.500
26	Toxoplasma Elisa IgG/IgM	123.500
I	**Pelayanan Fisioterapi**	
1	Diathermi + ES (sedang)	30.000
2	Diathermi + ES (kecil)	28.000
3	Diathermi + ES + Exc	40.000
4	Diathermi + ES + US /Traksi	37.000
5	Diathermi + US+Traksi	30.000
6	Diathermi	15.000
7	ES	15.000
8	Exc	8.000
9	Infra Red	13.000
10	Infra Red + ES	28.000
11	Infra Red + ES + Exc	35.000
12	Infra Red + Exc	25.000
13	Infra Red + US	28.000
J	**Pelayanan Jenazah**	
1	Pelayanan Dasar	40.000
2	Pendinginan di kulkas / hari	125.000
3	Pengawetan jenazah	450.000
4	Pembedahan jenazah	600.000

5	Pengeluaran bayi dari jenazah	700.000
6	Memandikan jenazah	150.000
7	Penjahitan jenazah < 25 cm	60.000
8	Penjahitan jenazah > 25 cm	90.000
9	Penjahitan jenazah > 100 cm	150.000
K	**Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Kesehatan**	
1	Keluar Negeri	25.000
2	Keterangan Tidak Berpenyakit menular	25.000
3	Pengujian Kesehatan oleh Dokter Penguji tersendiri	45.000
4	Grading Rumah Makan & Restoran	50.000
5	Keterangan Laik Sehat untu Usaha Menengah Keatas	70.000
6	Visum et Repertum	-
	Catatan : Belum termasuk biaya pemeriksaan sesuai dengan jenis	
L	**Pengolahan Sampah Medis dan Limbah Cair**	
1	Sampah medis kering volume 0-1 kg dihitung 1 kg	35.000 / kg
2	Sampah medis Basah Volume 0-1 kg (dihitung 1 kg)	35.000/Kg
3	Limbah cair Volume 0-1 m3 (dihitung 1 kg)	50.000 / Kg

M Tarif Pelayanan Ambulance

No	Jenis Pelayanan *Ambulance*	Tarif		Jasa Sarana	Pelayanan			
		Abanomen	Argometer		Transportasi	Para Medik	Umum	Spesialis
		Rp.	Rp.	%	%	%	%	%
1	*Ambulance Paramedik*	100.000	5.000/Km	70	13	17	-	-
2	*Ambulance* Medik Umum	100.000	8.000/Km	40	13	17	30	-
3	*Ambulance* Medik Spesialis	100.000	11.000/Km	40	13	17	-	30

N Besaran tarif pelayanan transportasi jenazah

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
		Abonemen	Bahan Habis Pakai		
		Rp.	Rp.	%	%
1.	Transportasi Jenazah	100.000	5.000/km	70	30

C. Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, dan Balai Pengobatan

NO	JENIS LAYANAN	JASA PELAYANAN (60%)	JASA SARANA (40%)	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	Rawat Jalan	12.000	8.000	20.000	
2	Rawat Darurat	24.000	16.000	40.000	
3	Rawat Inap				
	a. Rawat Inap per satu hari rawat	108.000	72.000	180.000	
	b. Visite dokter umum satu kali visite (maksimal 3 kali dalam sehari)	9.000	6.000	15.000	
	c. Biaya Rawat Inap per satu hari rawat bagi bayi yang dilahirkan di Puskesmas	54.000	36.000	90.000	
4	Tindakan Medik				
	a. Operatif				
	1. Sederhana	24.000	16.000	40.000	
	2. Kecil	48.000	32.000	80.000	
	3. Sedang	132.000	88.000	220.000	
	b. Non Operatif				
	1. Sederhana	12.000	8.000	20.000	
	2. Kecil	36.000	24.000	60.000	
	3. Sedang	60.000	40.000	100.000	
	c. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut				
	1. Sederhana	30.000	20.000	50.000	
	2. Kecil	45.000	30.000	75.000	
	3. Sedang	60.000	40.000	100.000	
	4. Berat	120.000	80.000	200.000	
5	Persalinan				
	a. Persalinan Normal				
	1. Penolong Bidan	720.000	480.000	1.200.000	
	2. Penolong Dokter Umum	900.000	600.000	1.500.000	
	b. Persalinan Patologis				
	1. Penolong Dokter Umum	1.080.000	720.000	1.800.000	
	c. Curetase				
	1. Dokter Umum	1.200.000	800.000	2.000.000	
	d. Paket ANC dengan USG Dasar oleh dokter umum	84.000	56.000	140.000	
6	I. Pemeriksaan laboratorium Patologi Klinik				
	A. Hematologi Kategori Canggih				
	1. Darah Lengkap (DL)	33.000	22.000	55.000	
	2. Golongan Darah	9.000	6.000	15.000	
	3. LED	13.200	8.800	22.000	
	4. HB	12.000	8.000	20.000	
	5. Waktu Perdarahan (BT)	9.000	6.000	15.000	
	6. Waktu Pembekuan (CT)	9.000	6.000	15.000	

	7. Hapusan Darah Tepi	27.000	18.000	45.000	
	B. Kimia Klinik Kategori Canggih				
	1. Cholesterol	16.200	10.800	27.000	
	2. Glucosa Sewaktu	12.000	8.000	20.000	
	3. Glucosa Puasa	12.000	8.000	20.000	
	4. Glucosa 2 jam PP	12.000	8.000	20.000	
	5. Uric Acid	15.000	10.000	25.000	
	II. Pemeriksaan Bakteriologi dan Parasitologi				
	A. Pemeriksaan Bakteriologi dan Parasitologi				
	1. Mycobacterium Tuberculosa (BTA)	15.000	10.000	25.000	
	2. Faeces Lengkap	15.000	10.000	25.000	
	3. Gram	15.000	10.000	25.000	
	4. Jamur preparat	15.000	10.000	25.000	
	5. Malaria Preparat	18.000	12.000	30.000	
	B. Pemeriksaan Urin Kategori sederhana				
	1. Urine lengkap (UL)	15.000	10.000	25.000	
	2. Sedimen	7.200	4.800	12.000	
	III. Pemeriksaan Imunologi				
	A. Pemeriksaan Imunologi Kategori Canggih				
	1. Beta HCG (Test Kehamilan)	21.000	14.000	35.000	
	B. Pemeriksaan Imunologi Kategori Sedang				
	1. Dengue Blood (DHF) (Ig M +Ig G)	120.000	80.000	200.000	
	2. HbSAg (Rapid test)	30.000	20.000	50.000	
	3. HIV	50.400	33.600	84.000	
	4. NS-1 Ag	144.000	96.000	240.000	
	5. TPHA	24.000	16.000	40.000	
	6. TPHA (kuantitatif)	23.100	15.400	38.500	
	7. WIDAL	24.300	16.200	40.500	
	8. Anti HCV (Rapid Test)	90.000	60.000	150.000	
	9. Rapid test Covid-19	59.400	39.600	99.000	
	10. RT PCR	165.000	110.000	275.000	
	11. TCM TB	270.000	180.000	450.000	
7	Pemeriksaan Kesehatan oleh dokter umum	27.000	18.000	45.000	
8	Pelayanan P3K kecuali yang bersifat Pemerintahan, sosial dan keagamaan	150.000	100.000	250.000/6 jam	
9	Pelayanan Kepada Warga Negara Asing	60%	40 %	2 kali lipat tarif WNI	2 kali lipat dari tarif WNI

Pengelolaan sampah medis dan limbah cair

No	Kelompok Retribusi	Satuan/Volume	Jangka Waktu	Besaran Tarif (Rp.)
1.	Sampah medis Kering Volume 0-1 kg (dihitung 1 kg)	per Kg	per sekali angkut	35.000
2.	Sampah medis Basah Volume 0-1 kg (dihitung 1 kg)	per Kg	per sekali angkut	35.000
3.	Limbah cair Volume 0-1 m3 (dihitung 1 kg)	per Kg	per sekali angkut	50.000

Tarif Pelayanan Ambulance

No	Jenis Pelayanan *Ambulance*	Tarif		Jasa Sarana	Pelayanan			
		Abanomen	Argometer		Transportasi	Para Medik	Umum	Spesialis
		Rp.	Rp	%	%	%	%	%
1	*Ambulance Paramedik*	100.000	5.000/Km	70	13	17	-	-
2	*Ambulance* Medik Umum	100.000	8.000/Km	40	13	17	30	-
3	*Ambulance* Medik Spesialis	100.000	11.000/Km	40	13	17	-	30

Besaran tarif pelayanan transportasi jenazah

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
		Abonemen	Bahan Habis Pakai		
		Rp.	Rp.	%	%
1.	Transportasi Jenazah	100.000	5.000/km	70	30

KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK OPERATIF

SEDERHANA	KECIL	SEDANG
1. Rawat Luka Rp. 40.000	1. WT/HT kurang dari 10 jaritan Rp. 80.000	1. WT/HT > 10 Jaritan Rp. 220.000
2. Debridemen tanpa anestesi Debridemen tanpa anestesi Rp. 40.000	2. Debridemen dengan anestesi lokal Rp. 80.000	2.WT/HT > 2 Tempat Rp. 220.000
3. Buka Jahitan Rp. 40.000	3. Vulnus Eksoriatum luas Rp. 80.000	3.WT /HT dengan rupture tendon atau pembuluh darah Rp. 220.000
4. Pasang Spalk pada anak 1 lokasi Rp 40.000	4. Pasang Spalk Ganda Rp. 80.000	4.Ekstirpasi tumor jinak Rp. 220.000
5. Pasang spalk pada ekstrimitas 1 lokasi (dewasa) Rp. 40.000	5. Pasang Spalk 1 lokasi pada exstrimitas bawah (dewasa) Rp. 80.000	5.Sunat dengan local anestesi Rp. 220.000
6. Pasang Mitela Rp. 40.000	6. Insisi/Eksisi Rp. 80.000	6.Luka Bakar lebih dari 10% Rp. 220.000
7. Ganti Verban Rp. 40.000	7. Luka bakar < 10% Rp. 80.000	7.Reposisi Dislokasi sendi bahu, siku,

		panggul,pergelangan, tumit,simpisis atau rahang Rp. 220.000
8. Tindik Biasa Rp 40.000	8. Eksplorasi Luka Rp. 80.000	8.Reposisi/Imobilisasi fraktur tertutup/terbuka Rp. 220.000
9. Tindik tembak Rp. 40.000	9. Biopsi Kecil Rp. 80.000	9.Reposisi dislokasi Rp. 220.000
10. Kontrol Post SC Rp. 40.000	10. Ekstraksi Kuku Rp. 80.000	10.Traksi Rp. 220.000
11. Kontrol Post Operasi Rp. 40.000	11. Amniotomi Rp. 80.000	11.Trakeostomi Rp. 220.000
	12. Pasang Norplant Rp. 80.000	12.Supra Pubic Puncture Rp. 220.000
	13. Buka Norplant Rp. 80.000	13.Laringoscopy Rp. 220.000
	14. Insisi abses Bartolin Rp. 80.000	14.Pemasangan WSD Rp. 220.000
	15. Heacting luka episiotomi Rp. 80.000	
	16. Evakuasi Korpus Alienum Rp. 80.000	15.Nekrotomi Rp. 220.000
	17. Epilasi Bulu Mata Rp. 80.000	16.Fungsi Pleura Rp. 220.000
	18. Aspirasi Irigasi after katarak Rp. 80.000	17.Fungsi Ascites Rp. 220.000
	19. Evakuasi Serumen /Spolling Rp. 80.000	18.Nekrotomi Luka DM dan Perawatannya Rp. 220.000
	20. Parasintesis Rp. 80.000	19.Placenta Manual Rp. 220.000
	21. Myringotomi Lokal Rp. 80.000	20.Ekstraksi translokasi IUD Rp. 220.000 21. Vena Seksi Rp. 220.000
	22. Kaustik Rp. 80.000	
	23. Tampon Anterior dan Bellocq Rp. 80.000	
	24. Pasang Infus Rp. 80.000	
	25. Pemasangan transfusi Darah Rp. 80.000	
	26. Pasang Douwer Cateter Rp. 80.000	

KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

SEDERHANA	KECIL	SEDANG
1. Oksigenasi < 1 jam Rp 20.000	1.Memasukkan obat rectal Rp. 60.000	1.Pemasangan NGT Rp 100.000
2. Pengambilan darah Rp 20.000	2.Lavement Rp. 60.000	2.EKG Rp 100.000
3. Kompres dingin Rp 20.000	3.Oksigenasi > 1 jam Rp. 60.000	3.Rontgen Rp 100.000
4. Kompres hangat Rp 20.000	4.Tampon Hidung Rp. 60.000	4.Resusitasi Kardiopulmonal Rp 100.000
5. Spool Infuse Rp 20.000	5.Tampon telinga Rp. 60.000	5.Cryoterapi Rp 100.000

6. Ganti Cairan Infus Rp 20.000	6.Kumbah Lambung Rp. 60.000	
7. Buka Infus Rp 20.000	7.Insersi IUD Rp. 60.000	
8. Buka Douwer Cateter Rp 20.000	8.Ekstraksi IUD Rp. 60.000	
	9.Pasang Balon Kateter pada partus Rp. 60.000	
9. Vaginal Swab Rp 20.000	10.Tampon Uterus Rp. 60.000	
10. Vaginal Toucher (VT) Rp 20.000	11.Pap Smear Rp. 60.000	
11. Memberi Obat Injeksi Rp 20.000	12.IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) Rp. 60.000	
12. Melakukan Skin Test Rp 20.000	13.Pemeriksaan Visus Rp. 60.000	
13. Kontrol IUD Rp 20.000	14.Trial and Error Refraksi Rp. 60.000	
14. Memandikan Bayi Aterm Rp 20.000	15.Pemeriksaan Fundus mata Rp. 60.000	
	16.Tonometri Mata Rp. 60.000	
	17.Drip Aminophilin Rp. 60.000	
	18.Tiap Jenis Test Gizi Rp. 60.000	
	23.Pemasangan Darmbuis Rp. 60.000	
	24.Suction Rp. 60.000	
	25. Nebulizer Rp. 60.000	
	26. Akupresur Rp. 60.000	

KALSIFIKASI TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

SEDERHANA	KECIL	SEDANG	BERAT
1.Tumpatan sementara 1 gigi tanpa open bor Rp 50.000	1.Cabut Gigi Permanen dengan Lokal anstesi tanpa penyulit Rp. 75.000	1.Operculectomy Rp. 100.000	1. Cabut 1 gigi dengan anestesi lokal ada penyulit Rp 200.000
2.Cabut Gigi sulung dengan topical anestesi Rp 50.000	2.cabut Gigi sulung dengan injeksi/local anestesi Rp. 75.000	2.Ginggivectomy Rp 100.000	2.Odontectomy Rp 200.000
3.Cabut Gigi permanen dengan topical anestesi Rp 50.000	3.Open Bor/Ekstirpasi pulpa 1 gigi termasuk pengobatan Pulpa dan tumpatan sementara Rp. 75.000	3 Scalling per rahang Rp 100.000	3. Tumpatan Permanen Composite (OD/OM/MOD) Rp 200.000
4.Kontrol Day Socket Rp 50.000	4.Kontrol Post Operasi ganti drain Rp. 75.000	4.Tumpatan Permanen (GIC) OD/OM/MOD Rp. 100.000	
5.Pembersihan Cavitas Gigi /Lubang Gigi Rp 50.000	5.Tumpatan Permanen (GIC) pada oklusal Gigi Rp. 75.000	5.Tumpatan Permanen Composite pada oklusal Gigi Rp. 100.000	

6.Oklusal Adjusment /grinding 1 Regio Rp 50.000	6.Buka Kawat Fiksasi Rp. 75.000	6. Eksisi Epulis Kecil Rp 100.000	
	7.Fissure sealant per gigi Rp. 75.000	7. Curetage per regio Rp 100.000	
	8.Topical Aplikasi per regio Rp. 75.000	8.Fiksasi interdental Rp 100.000	
	9.Insisi Abses intra Oral Rp. 75.000	10. Insisi abses Ekstra Oral Rp 100.000	

D. Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Kabupaten Karangasem

1 Pelayanan Rawat Jalan

No.	Jenis Pelayanan Rawat Jalan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik		Total
				Umum/Gigi	Spesialis	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Rawat Jalan Paramedik	15.000	5.000	-	-	20.000
2	Rawat Jalan Medik Umum	15.000	5.000	15.000	-	35.000
3	Rawat Jalan Medik Spesialis	15.000	5.000	-	30.000	50.000
4	Rawat Jalan VIP (Eksekutif)	30.000	15.000	-	60.000	105.000

2 Pelayanan Rawat Darurat

No.	Jenis Pelayanan Rawat Darurat	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik		Total
				Umum	Spesialis	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Rawat Darurat Paramedik	30.000	10.000	-	-	40.000
2	Rawat Darurat Medik Umum	30.000	10.000	30.000	-	70.000
3	Rawat Darurat Medik Spesialis	30.000	10.000	30.000	60.000	130.000

3 Pelayanan Ambulance

No	Jenis Pelayanan *Ambulance*	Tarif		Jasa Sarana	Pelayanan			
		Abanomen	Argometer		Transportasi	Para Medik	Umum	Spesialis
		Rp.	Rp.	%	%	%	%	%
1	*Ambulance Paramedik*	100.000	5.000/Km	70	13	17	-	-
2	*Ambulance* Medik Umum	100.000	8.000/Km	40	13	17	30	-
3	*Ambulance* Medik Spesialis	100.000	11.000/Km	40	13	17	-	30

4 Pelayanan Rawat Inap

No.	Jenis Pelayanan Rawat Inap	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik		Total
				Umum	Spesialis	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Akomodasi Kelas III	55.000	10.000	-	-	65.000
	Kelas III Umum	55.000	10.000	25.000	-	90.000
	Kelas III Spesialis	55.000	10.000	-	50.000	115.000

2	Akomodasi Kelas II	85.000	20.000	-	-	105.000
	Kelas II Umum	85.000	20.000	30.000	-	135.000
	Kelas II Spesialis	85.000	20.000	-	60.000	165.000
3	Akomodasi Kelas I	115.000	30.000	-	-	145.000
	Kelas I Umum	115.000	30.000	35.000	-	180.000
	Kelas I Spesialis	115.000	30.000	-	70.000	215.000
4	Akomodasi VIP - B	196.000	40.000	-	-	236.000
	VIP-B Umum	196.000	40.000	40.000	-	276.000
	VIP-B Spesialis	196.000	40.000	-	80.000	316.000
5	Akomodasi VIP-A	362.500	50.000	-	-	412.500
	VIP-A Umum	362.500	50.000	50.000	-	462.500
	VIP-A Spesialis	362.500	50.000	-	100.000	512.500
6	Akomodasi Mahotama	585.000	100.000			685.000
	Mahotama Umum	585.000	100.000	80.000		765.000
	Mahotama Spesialis	585.000	100.000		160.000	845.000
7	Akomodasi ICU/ICCU/NICU/perinatologi /PICU primer	348.000	50.000	-	-	398.000
	ICU/ICCU/NICU/perinatologi/ PICU Primer Umum	348.000	50.000	60.000	-	458.000
	ICU/ICCU/NICU/peri natologi/ PICU primer Spesialis	348.000	50.000	-	120.000	518.000
8	Akomodasi HCU/RR/Oneday care	105.000	25.000	-	-	130.000
	HCU/RR/Oneday care Umum	105.000	25.000	40.000	-	170.000
	HCU/RR/Oneday care Spessialis	105.000	25.000	-	80.000	210.000

5 Tindakan Medis

a. Tindakan Medik Sederhana

No.	Katagori Tindakan Medik (ASA 1-2)	Kode Tind.	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik			Tarif
					Operator	Asisten Operator	Anastesi	
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Tindakan Medik Sederhana 1	TSr1	4.500	2.500	5.000	-	-	12.000
2	Tindakan Medik Sederhana 1A	TSr1A12	4.500	2.500	5.000	-	2.000	14.000
3	Tindakan Medik Sederhana 1A	TSr1A34	4.500	2.500	5.000	-	2.500	14.500
4	Tindakan Medik Sederhana 2	TSr2	9.500	5.000	10.000	-	-	24.500
5	Tindakan Medik Sederhana 2A	TSr2A12	9.500	5.000	10.000	-	4.000	28.500
6	Tindakan Medik Sederhana 2A	TSr2A34	9.500	5.000	10.000	-	5.000	29.500
7	Tindakan Medik Sederhana 3	TSr3	14.000	7.500	15.000	-	-	36.500
8	Tindakan Medik Sederhana 3A	TSr3A12	14.000	7.500	15.000	-	6.000	42.500
9	Tindakan Medik Sederhana 3A	TSr3A34	14.000	7.500	15.000	-	7.500	44.000
10	Tindakan Medik Sederhana 4	TSr4	18.000	10.000	20.000	-	-	48.000
11	Tindakan Medik Sederhana 4A	TSr4A12	18.000	10.000	20.000	-	8.000	56.000
12	Tindakan Medik Sederhana 4A	TSr4A34	18.000	10.000	20.000	-	10.000	58.000
13	Tindakan Medik Sederhana 5	TSr5	22.500	12.500	25.000	-	-	60.000
14	Tindakan Medik Sederhana 5A	TSr5A12	22.500	12.500	25.000	-	10.000	70.000
15	Tindakan Medik Sederhana 5A	TSr5A34	22.500	12.500	25.000	-	12.500	72.500

b. Tindakan Medik Kecil

No.	Katagori Tindakan Medik (ASA 1-2)	Kode Tind.	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik			Tarif
					Operator	Asisten Operator	Anastesi	
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Tindakan Medik Kecil 1	TK1	46.500	25.000	50.000	-	-	121.500
2	Tindakan Medik Kecil 1A	TK1A12	46.500	25.000	50.000	-	20.000	141.500
3	Tindakan Medik Kecil 1A	TK1A34	46.500	25.000	50.000	-	25.000	146.500
4	Tindakan Medik Kecil 2	TK2	68.000	37.500	75.000	-	-	180.500
5	Tindakan Medik Kecil 2A	TK2A12	68.000	37.500	75.000	-	30.000	210.500
6	Tindakan Medik Kecil 2A	TK2A34	68.000	37.500	75.000	-	37.500	218.000
7	Tindakan Medik Kecil 3	TK3	92.000	50.000	100.000	-	-	242.000
8	Tindakan Medik Kecil 3A	TK3A12	92.000	50.000	100.000	-	40.000	282.000
9	Tindakan Medik Kecil 3A	TK3A34	92.000	50.000	100.000	-	50.000	292.000

10	Tindakan Medik Kecil 4	TK4	115.000	62.500	125.000	-	-	302.500
11	Tindakan Medik Kecil 4A	TK4A12	115.000	62.500	125.000	-	50.000	352.500
12	Tindakan Medik Kecil 4A	TK4A34	115.000	62.500	125.000	-	62.500	365.000
13	Tindakan Medik Kecil 5	TK5	140.000	75.000	150.000	-	-	365.000
14	Tindakan Medik Kecil 5A	TK5A12	140.000	75.000	150.000	-	60.000	425.000
15	Tindakan Medik Kecil 5A	TK5A34	140.000	75.000	150.000	-	75.000	440.000

c. Tindakan Medik Sedang

No.	Katagori Tindakan Medik (ASA 1-2)	Kode Tind.	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik			Tarif
					Operator	Asisten Operator	Anastesi	
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Tindakan Medik Sedang 1	TSd1	230.000	125.000	250.000	37.500	-	642.500
2	Tindaka Medik Sedang 1A	TSd1A12	230.000	125.000	250.000	37.500	100.000	742.500
3	Tindaka Medik Sedang 1A	TSd1A34	230.000	125.000	250.000	37.500	125.000	767.500
4	Tindakan Medik Sedang 2	TSd2	345.000	187.500	375.000	56.250	-	963.750
5	Tindakan Medik Sedang 2A	TSd2A12	345.000	187.500	375.000	56.250	150.000	1.113.750
6	Tindakan Medik Sedang 2A	TSd2A34	345.000	187.500	375.000	56.250	187.500	1.151.250
7	Tindakan Medik Sedang 3	TSd3	460.000	250.000	500.000	75.000	-	1.285.000
8	Tindakan Medik Sedang 4A	TSd3A12	460.000	250.000	500.000	75.000	200.000	1.485.000
9	Tindakan Medik Sedang 4A	TSd3A34	460.000	250.000	500.000	75.000	250.000	1.535.000
10	Tindakan Medik Sedang 4	TSd4	570.000	312.500	625.000	93.750	-	1.601.250
11	Tindakan Medik Sedang 4A	TSd4A12	570.000	312.500	625.000	93.750	250.000	1.851.250
12	Tindakan Medik Sedang 4A	TSd4A34	570.000	312.500	625.000	93.750	312.500	1.913.750
13	Tindakan Medik Sedang 5	TSd5	695.000	375.000	750.000	112.500	-	1.932.500
14	Tindakan Medik Sedang 5A	TSd5A12	695.000	375.000	750.000	112.500	300.000	2.232.500
15	Tindakan Medik Sedang 5A	TSd5A34	695.000	375.000	750.000	112.500	375.000	2.307.500

d. Tindakan Medik Besar

No.	Katagori Tindakan Medik (ASA 1-2)	Kode Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik			Tarif
					Operator	Asisten Operator	Anastesi	
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Tindakan Medik Besar 1	TB1	925.000	500.000	1.000.000	150.000	-	2.575.000
2	Tindakan Medik Besar 1A	TB1 A12	925.000	500.000	1.000.000	150.000	400.000	2.975.000
3	Tindakan Medik Besar 1A	TB1 A34	925.000	500.000	1.000.000	150.000	500.000	3.075.000
4	Tindakan Medik Besar 2	TB2	1.160.000	625.000	1.250.000	187.500	-	3.222.500

5	Tindakan Medik Besar 2A	TB2 A12	1.160.000	625.000	1.250.000	187.500	500.000	3.722.500
6	Tindakan Medik Besar 2A	TB2 A34	1.160.000	625.000	1.250.000	187.500	625.000	3.847.500
7	Tindakan Medik Besar 3	TB3	1.390.000	750.000	1.500.000	225.000	-	3.865.000
8	Tindakan Medik Besar 3A	TB3 A12	1.390.000	750.000	1.500.000	225.000	600.000	4.465.000
9	Tindakan Medik Besar 3A	TB3 A34	1.390.000	750.000	1.500.000	225.000	750.000	4.615.000
10	Tindakan Medik Besar 4	TB4	1.620.000	875.000	1.750.000	262.500	-	4.507.500
11	Tindakan Medik Besar 4A	TB4 A12	1.620.000	875.000	1.750.000	262.500	700.000	5.207.500
12	Tindakan Medik Besar 4A	TB4 A34	1.620.000	875.000	1.750.000	262.500	875.000	5.382.500
13	Tindakan Medik Besar 5	TB5	1.850.000	1.000.000	2.000.000	300.000	-	5.150.000
14	Tindakan Medik Besar 5A	TB5 A12	1.850.000	1.000.000	2.000.000	300.000	800.000	5.950.000
15	Tindakan Medik Besar 5A	TB5 A34	1.850.000	1.000.000	2.000.000	300.000	1.000.000	6.150.000

e. Tindakan Medik Khusus

No.	Katagori Tindakan Medik (ASA 1-2)	Kode Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik			Tarif
					Operator	Asisten Operator	Anastesi	
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Tindakan Medik Khusus 1	TKh1	2.320.000	1.250.000	2.500.000	375.000	-	6.445.000
2	Tindakan Medik Khusus 1A	TKh1 A12	2.320.000	1.250.000	2.500.000	375.000	1.000.000	7.445.000
3	Tindakan Medik Khusus 1A	TKh1 A34	2.320.000	1.250.000	2.500.000	375.000	1.250.000	7.695.000
4	Tindakan Medik Khusus 2	TKh2	2.800.000	1.562.000	3.125.000	468.750	-	7.955.750
5	Tindakan Medik Khusus 2A	TKh2 A12	2.800.000	1.562.000	3.125.000	468.750	1.250.000	9.205.750
6	Tindakan Medik Khusus 2A	TKh2 A34	2.800.000	1.562.000	3.125.000	468.750	1.562.500	9.518.250
7	Tindakan Medik Khusus 3	TKh3	3.450.000	1.875.000	3.750.000	562.500	-	9.637.500
8	Tindakan Medik Khusus 3A	TKh3 A12	3.450.000	1.875.000	3.750.000	562.500	1.500.000	11.137.500
9	Tindakan Medik Khusus 3A	TKh3 A34	3.450.000	1.875.000	3.750.000	562.500	1.875.000	11.512.500
10	Tindakan Medik Khusus 4	TKh4	4.000.000	2.187.500	4.375.000	656.250	-	11.218.750
11	Tindakan Medik Khusus 4A	TKh4 A12	4.000.000	2.187.500	4.375.000	656.250	1.750.000	12.968.750
12	Tindakan Medik Khusus 4A	TKh4 A34	4.000.000	2.187.500	4.375.000	656.250	2.187.500	13.406.250
13	Tindakan Medik Khusus 5	TKh5	4.600.000	2.500.000	5.000.000	750.000	-	12.850.000
14	Tindakan Medik Khusus 5A	TKh5 A12	4.600.000	2.500.000	5.000.000	750.000	2.000.000	14.850.000
15	Tindakan Medik Khusus 5A	TKh5 A34	4.600.000	2.500.000	5.000.000	750.000	2.500.000	15.350.000

f. Tindakan Medik Canggih

No.	Katagori Tindakan Medik (ASA 1-2)	Kode Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik			Tarif
					Operator	Asisten Operator	Anastesi	
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Tindakan Medik Canggih 1	TC1	5.800.000	3.125.000	6.250.000	937.500	-	16.112.500
2	Tindakan Medik Canggih 1A	TC1 A12	5.800.000	3.125.000	6.250.000	937.500	2.500.000	18.612.500
3	Tindakan Medik Canggih 1A	TC1 A34	5.800.000	3.125.000	6.250.000	937.500	3.125.000	19.237.500
4	Tindakan Medik Canggih 2	TC2	6.950.000	3.750.000	7.500.000	1.125.000	-	19.325.000
5	Tindakan Medik Canggih 2A	TC2 A12	6.950.000	3.750.000	7.500.000	1.125.000	3.000.000	22.325.000
6	Tindakan Medik Canggih 2A	TC2 A34	6.950.000	3.750.000	7.500.000	1.125.000	3.750.000	23.075.000
7	Tindakan Medik Canggih 3	TC3	8.100.000	4.375.000	8.750.000	1.312.500	-	22.537.500
8	Tindakan Medik Canggih 3A	TC3 A12	8.100.000	4.375.000	8.750.000	1.312.500	3.500.000	26.037.500
9	Tindakan Medik Canggih 3A	TC3 A34	8.100.000	4.375.000	8.750.000	1.312.500	4.375.000	26.912.500
10	Tindakan MedikCanggih 4	TC4	9.200.000	5.000.000	10.000.000	1.500.000	-	25.700.000
11	Tindakan Medik Canggih 4A	TC4 A12	9.200.000	5.000.000	10.000.000	1.500.000	4.000.000	29.700.000
12	Tindakan Medik Canggih 4A	TC4 A34	9.200.000	5.000.000	10.000.000	1.500.000	5.000.000	30.700.000
13	Tindakan MedikCanggih 5	TC5	10.400.000	5.625.000	11.250.000	1.687.500	-	28.962.500
14	Tindakan Medik Canggih 5A	TC5 A12	10.400.000	5.625.000	11.250.000	1.687.500	4.500.000	33.462.500
15	Tindakan Medik Canggih 5A	TC5 A34	10.400.000	5.625.000	11.250.000	1.687.500	5.625.000	34.587.500

6 Pelayanan Persalinan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik				Tarif
				Sp.OG	Asisten Operator	Sp.An	Sp.A	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
A	DITOLONG BIDAN							
1	Partus Normal (Bidan jaga)	400.000	300.000	-	-	-	-	700.000
2	Partus Normal (Bidan Khusus)	400.000	500.000	-	-	-	-	900.000
B	DITOLONG RESIDEN/DR. UMUM							
1	Partus Normal (Dr. Jaga)	400.000	300.000	350.000	-	-	70.000	1.120.000
2	Partus Abnormal (Dr. Jaga)	600.000	400.000	500.000	-	-	100.000	1.600.000
C	DITOLONG SPESIALIS OBGIN							
1	Partus Normal (Spesialis jaga)	400.000	300.000	850.000	-	-	170.000	1.720.000

2	Partus Normal (Spesialis jaga/cito)	400.000	300.000	1.050.000	-	-	210.000	1.960.000
3	Partus Normal (Spesialis khusus)	400.000	300.000	1.000.000	-	-	200.000	1.900.000
4	Partus Normal (Spesialis khusus/cito)	400.000	300.000	1.500.000	-	-	300.000	2.500.000
5	Partus Abnormal (Spesialis jaga)	600.000	400.000	1.250.000	-	-	250.000	2.500.000
6	Partus Abnormal (Spesialis jaga/cito)	600.000	400.000	1.500.000	-	-	300.000	2.800.000
7	Partus Abnormal (Specialis khusus)	600.000	400.000	1.250.000	-	-	250.000	2.500.000
8	Partus Abnormal (Spesialis khusus/cito)	600.000	400.000	1.875.000	-	-	375.000	3.250.000
9	Sectio Caesaria (Spesialis jaga)	1.050.000	500.000	1.800.000	270.000	720.000	360.000	4.700.000
10	Sectio Caesaria (Spedialis jaga/cito)	1.050.000	600.000	2.000.000	300.000	800.000	400.000	5.150.000
11	Sectio Caesaria (Spesialis khusus)	1.050.000	600.000	2.500.000	375.000	1.000.000	500.000	6.025.000
12	Sectio Caesaria (Specialis Khusus/cito)	1.050.000	700.000	3.000.000	450.000	1.200.000	600.000	7.000.000
13	Partus tanpa rasa nyeri (specialis jaga)	700.000	300.000	850.000	-	425.000	170.000	2.445.000
14	Partus tanpa rasa nyeri (specialis jaga/cito)	700.000	300.000	1.050.000	-	525.000	210.000	2.785.000
15	Partus tanpa rasa nyeri (specialis khusus)	700.000	300.000	1.000.000	-	500.000	200.000	2.700.000
16	Partus tanpa rasa nyeri (specialis khusus/cito)	700.000	300.000	1.500.000	-	750.000	300.000	3.550.000
17	Partus metode water birth (specialis jaga)	800.000	400.000	1.000.000	-	-	200.000	2.400.000
18	Partus metode water birth (specialis jaga/cito)	800.000	400.000	1.500.000	-	-	300.000	3.000.000
19	Partus metode water birth (specialis khusus)	800.000	400.000	1.250.000	-	-	250.000	2.700.000
20	Partus metode water birth (specialis Khusus/cito)	800.000	400.000	1.875.000	-	-	375.000	3.450.000

7 Pelayanan Rehabilitasi Medik

No.	Jenis Tindakan Rehabilitasi Medik	Kode Tindk	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik Spesialis	Tarif
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Tindakan Sederhana 1	TSr1	4.500	2.500	5.000	12.000
2	Tindakan Sederhana 2	TSr2	12.000	10.000	10.000	32.000
3	Tindakan Sederhana 3	TSr3	15.000	12.000	12.000	39.000
4	Tindakan Sederhana 4	TSr4	25.000	15.000	15.000	55.000
5	Tindakan Sederhana 5	TSr5	28.000	17.000	25.000	70.000
6	Tindakan Kecil 1	TK1	46.500	25.000	50.000	121.500
7	Tindakan Kecil 2	TK2	69.500	37.500	75.000	182.000
8	Tindakan Kecil 3	TK3	92.500	50.000	100.000	242.500
9	Tindakan Kecil 4	TK4	116.000	62.500	125.000	303.500

8 Pelayanan Dialisis

No	Jenis Tindakan Dialisa	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik Spesialis	Tarif
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Ganti Transfer Set	40.000	20.000	50.000	110.000
2	Hemodialisis Baru Bicarbonat	650.000	100.000	150.000	900.000
3	Hemodialisis Re-Use Bicarbonat	450.000	115.000	150.000	715.000
4	Penggantian Cairan/Training	15.000	10.000	20.000	45.000
5	Dialiser Baru cito	650.000	100.000	225.000	975.000
6	Dialiser Re-Use Cito	450.000	115.000	225.000	790.000

9 Konsultasi Khusus dan Tindakan Khusus

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Tarif
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Konsultasi Gizi	5.000	5.000	-	10.000
2	Konsultasi Ahli Gizi	5.000	5.000	10.000	20.000
3	Konsultasi psikologi	15.000	5.000	15.000	35.000
3	Tindakan Psikologi	25.000	10.000	50.000	85.000
4	Konsultasi Psichiatri	15.000	5.000	30.000	50.000
5	Tindakan Psikoterapi	25.000	10.000	125.000	160.000

10 Pelayanan Medikolegal

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Tarif
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat melamar sekolah	8.500	3.000	3.500	15.000
2	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat melamar Pekerjaan	8.500	3.000	3.500	15.000
3	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat mencari SIM	8.500	3.000	3.500	15.000
4	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat luar Negeri	8.500	3.000	3.500	15.000
5	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat *medikal Sertificate*	25.000	6.000	9.000	40.000
6	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat Keterangan Kematian	7.500	1.000	1.500	10.000
7	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat Keterangan Kelahiran	11.000	1.500	3.500	16.000
8	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat Visum	20.000	6.000	9.000	35.000
9	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat Resume Medik	20.000	6.000	9.000	35.000
10	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat Surat Keterangan Bebas Narkoba	8.500	3.000	3.500	15.000
11	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat Surat Keterangan Sehat Jiwa	8.500	3.000	3.500	15.000

11 Pelayanan Jenasah

No.	Perawatan Jenazah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Tarif
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Penitipan jenazah di luar freezer dan biaya administrasi per hari	15.000	10.000	-	25.000
2	Penitipan jenazah menggunakan freezer per hari	80.000	20.000	-	100.000
3	Pengawetan jenazah	300.000	500.000	-	800.000
4	Pembedahan jenazah	350.000	150.000	500.000	1.000.000
5	Memandikan jenazah	50.000	150.000	-	200.000
6	Membungkus jenazah dengan kain kapan	75.000	25.000	-	100.000
7	Pengawetan jenazah di luar Rumah Sakit, belum termasuk biaya transport	300.000	600.000	-	900.000
8	Visum mayat	50.000	20.000	50.000	120.000

Besaran tarif pelayanan transportasi jenazah

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
		Abonemen	Bahan Habis Pakai		
		Rp.	Rp.	%	%
1.	Transportasi Jenazah	100.000	5.000/km	70	30

12 Pelayanan Penunjang Diagnostik yang terdiri dari:

- **Pelayanan Radiodiagnostik**

TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI SEDERHANA

No	Jenis pemeriksaan		Jasa sarana	Jasa pelayanan	Jasa medis spesialis	Tarif
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	KEPALA	Kepala/skull	123.000	66.300	35.700	225.000
		Waters/SPN	82.500	43.800	23.700	150.000
		Mastoid/	123.000	66.300	35.700	225.000
		Mandibula	90.000	48.700	26.300	165.000

		TMJ (OM/CM)	123.000	66.300	35.700	225.000
		Nasal	82.500	43.800	23.700	150.000
		Kepala Proyeksi	90.000	48.700	26.300	165.000
2	THORAX	Thorax AP/PA	82.500	43.800	23.700	150.000
		Thorax LAT	82.500	43.800	23.700	150.000
		Thorax Oblique	90.000	48.700	26.300	165.000
		Thorax Top	90.000	48.700	26.300	165.000
		Thorax	90.000	48.700	26.300	165.000
3	ABDOMEN	Abdomen/BNO	88.000	46.800	25.200	160.000
		Abdomen 3	247.500	131.700	70.800	450.000
5	PELVIS	Pelvis AP/PA	88.000	46.800	25.200	160.000
		Pelvis Oblique	90.000	48.700	26.300	165.000
		Pelvis	96.200	51.200	27.600	175.000
		Hip joint	82.500	43.800	23.700	150.000
5	VERTEBRA/SPINE	Cervical	123.000	66.300	35.700	225.000
		Cervical 4	247.500	131.600	70.900	450.000
		Thoracal	125.000	64.300	35.700	225.000
		Scoliosis View	247.500	131.600	70.900	450.000
		Lumbal	123.000	66.300	35.700	225.000
		Lumbal	101.700	54.100	29.200	185.000
		Sacrum	123.000	66.300	35.700	225.000
		Coxygeus	123.000	66.300	35.700	225.000
		Thoraco	123.000	66.300	35.700	225.000
		Lumbu Sacral	123.000	66.300	35.700	225.000
6	EXTREMITAS ATAS	Shoulder AP	77.000	40.900	22.100	140.000
		Scapula AP/PA	77.000	40.900	22.100	140.000
		Scapula Y view	96.200	51.200	27.600	175.000
		Clavicula	77.000	40.900	22.100	140.000
		Clavicula	82.500	45.500	22.000	150.000
		Humerus	112.700	59.900	32.400	205.000
		Elbow /Cubiti	112.700	59.900	32.400	205.000
		Antebrachii	112.700	59.900	32.400	205.000
		Wrist joint	112.700	59.900	32.400	205.000
		Manus	112.700	59.900	32.400	205.000
		Manus	118.200	62.900	33.900	215.000
7	EXTREMITAS BAWAH	Femur AP+LAT	118.200	62.900	33.900	215.000
		Genu AP+LAT	112.700	59.900	32.400	205.000
		Sky Line/View	112.700	59.900	32.400	205.000
		Genu Weight	225.500	119.900	64.600	410.000
		Cruris AP+LAT	118.200	62.900	33.900	215.000

		Ankle AP+LAT	112.700	59.900	32.400	205.000
		Mortise View	96.200	51.200	27.600	175.000
		Pedis	112.700	59.900	32.400	205.000
		Calcaneus View	118.200	62.900	33.900	215.000
8	PANORAMIK	-	123.000	66.300	35.700	225.000
9	BABY GRAM	-	93.500	50.400	26.100	170.000
10	BONE SURVEY	-	742.500	394.800	212.700	1.350.000
11	C ARM	-	180.000	150.000	70.000	400.000

TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI KONTRAS

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa pelayanan	Jasa Medik Spesialis	Tarif
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Esophagografi	357.500	190.100	102.400	650.000
2	Cystografi	357.500	190.100	102.400	650.000
3	Uretrocystografi	357.500	190.100	102.400	650.000
4	Caudografi	357.500	190.100	102.400	650.000
5	BVUC	357.500	190.100	102.400	650.000
6	IVP	385.000	204.700	110.300	700.000
7	HSG	385.000	157.500	157.500	700.000
8	Colon In Loop	357.500	190.100	102.400	650.000
9	Fistulografi	357.500	146.250	146.250	650.000
10	Lopografi	357.500	190.100	102.400	650.000
11	Barium Intake	357.500	190.100	102.400	650.000
12	Barium Follow Trough	357.500	190.100	102.400	650.000
13	Appendicogram	357.500	190.100	102.400	650.000
14	Sialografi	357.500	190.100	102.400	650.000
15	Dacryografi	357.500	190.100	102.400	650.000
16	RPG/APG	357.500	190.100	102.400	650.000

TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI CT SCAN TANPA KONTRAS

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa pelayanan	Jasa Medik Spesialis	Tarif
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Kepala	688.100	365.000	196.900	1.250.000
	Kepala (2 Posisi)	797.500	424.000	228.500	1.450.000
	Kepala (3 Posisi)	907.500	482.600	259.900	1.650.000
	Kepala Dengan Bone Window + 3D	990.000	526.500	283.500	1.800.000

	Kepala Dengan Kontras	990.000	526.500	283.500	1.800.000
2	Mastoid	797.500	424.000	228.500	1.450.000
	Mastoid Dengan Bone Window + 3D	1.100.000	585.000	315.000	2.000.000
	Mastoid Dengan Kontras	1.293.000	687.000	370.000	2.350.000
3	Orbita	797.500	424.000	228.500	1.450.000
	Orbita Dengan Bone Window + 3D	1.100.000	585.000	315.000	2.000.000
	Orbita Dengan Kontras	1.293.000	687.000	370.000	2.350.000
4	Sinus + Nasopharing	797.500	424.000	228.500	1.450.000
	Sinus + Nasopharing Dengan	907.500	482.600	259.900	1.650.000
	Sinus + Nasopharing Dengan 3D	1.312.000	247.000	291.000	1.850.000
	Sinus + Nasopharing Dengan	1.100.000	585.000	315.000	2.000.000
	Sinus + Nasopharing Dengan	1.293.000	687.000	370.000	2.350.000
5	Thorax	1.100.000	585.000	315.000	2.000.000
	Thorax Dengan Bone Window	1.320.000	702.000	378.000	2.400.000
	Thorax Dengan 3D	1.540.000	819.000	441.000	2.800.000
	Thorax Dengan Bone Window + 3D	1.650.000	877.500	472.500	3.000.000
	Thorax Dengan Kontras	1.659.000	877.000	364.000	2.900.000
6	Abdomen	1.375.000	731.200	393.800	2.500.000
	Abdomen Dengan Bone Window + 3D	1.925.000	1.023.700	551.300	3.500.000
	Abdomen Dengan Kontras	1.925.000	1.023.700	551.300	3.500.000
7	Ct Scan Stonograpy	1.787.500	950.600	511.900	3.250.000
8	Ct Scan Urografi	1.925.000	1.023.700	551.300	3.500.000
9	Cervical/Thoracal/Lumbal	1.237.500	658.100	354.400	2.250.000
	Cervical/Thoracal/Lumbal Dengan	1.650.000	877.500	472.500	3.000.000
	Cervical/Thoracal/Lumbal Dengan	1.650.000	877.500	472.500	3.000.000
10	Pelvis	1.237.500	658.100	354.400	2.250.000
	Pelvis Dengan Bone Window +3D	1.650.000	877.500	472.500	3.000.000
	Pelvis Dengan Kontras	1.650.000	877.500	472.500	3.000.000
11	Ektrimitas Atas	1.237.500	658.100	354.400	2.250.000
	Ektrimitas Atas Dengan Bone	1.650.000	877.500	472.500	3.000.000
	Ektrimitas Atas Dengan Kontras	1.650.000	877.500	472.500	3.000.000
12	Ektrimitas Bawah	1.237.500	658.100	354.400	2.250.000
13	Ektrimitas Bawah Dengan Bone	1.650.000	877.500	472.500	3.000.000
14	Ektrimitas Bawah Dengan	1.650.000	877.500	472.500	3.000.000

TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI USG

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik Spesialis	Tarif
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	USG Abdomen Atas	140.250	57.950	86.800	285.000
2	USG Abdomen Bawah	140.250	57.950	86.800	285.000
3	USG Abdomen Atas dan Bawah	195.000	63.000	95.000	353.000
4	USG Urologi	140.250	57.950	86.800	285.000
5	USG Appendix	165.000	54.000	81.000	300.000
6	USG Testis	165.000	54.000	81.000	300.000
7	USG Mamae	140.250	57.950	86.800	285.000
8	USG Superfisial	165.000	54.000	81.000	300.000
9	USG Thyroid	140.250	57.950	86.800	285.000
10	USG Colli	165.000	54.000	81.000	300.000
11	USG Axilla Linguinal	140.250	57.950	86.800	285.000
12	USG Doppler Per Regio	275.000	90.000	135.000	500.000
13	USG Thorax Marker Per Regio	140.250	57.950	86.800	285.000
14	USG Bahu	140.250	57.950	86.800	285.000
15	USG Bahu Bilateral	195.000	63.000	95.000	353.000
16	USG Bayi	165.000	54.000	81.000	300.000
17	USG Cimino	195.000	63.000	95.000	353.000
18	USG Doppler Abdomen	195.000	63.000	95.000	353.000
19	USG Doppler Carotis/TCD	165.000	54.000	81.000	300.000
20	USG Doppler Extremitas	165.000	54.000	81.000	300.000
21	USG Doppler Testis	165.000	54.000	81.000	300.000
22	USG Lengan	140.250	57.950	86.800	285.000
23	USG Lengan Bilateral	195.000	63.000	95.000	353.000
24	USG Parotis	195.000	63.000	95.000	353.000
25	USG Ankle	140.250	57.950	86.800	285.000
26	USG Ankle Bilateral	195.000	63.000	95.000	353.000
27	USGCardia	195.000	63.000	95.000	353.000
28	USG Colour Doppler 3 Dimensi	195.000	63.000	95.000	353.000
29	USG Elbow	140.250	57.950	86.800	285.000
30	USG Elbow Bilateral	195.000	63.000	95.000	353.000
31	USG Genu	140.250	57.950	86.800	285.000
32	USG Genu Bilateral	195.000	63.000	95.000	353.000
33	USG Kandungan-Ibu Hamil	140.250	57.950	86.800	285.000
34	USG Mata/Paru	165.000	54.000	81.000	300.000
35	USG Muscoloscketal lain	165.000	54.000	81.000	300.000
36	USG Organ	165.000	54.000	81.000	300.000

37	USG Pedis	140.250	57.950	86.800	285.000
38	USG Pedis Bilateral	195.000	63.000	95.000	353.000
39	USG Prostat Trans Rectal	165.000	54.000	81.000	300.000
40	USG Whole Abdomen	165.000	54.000	81.000	300.000
41	USG Wrist	140.250	57.950	86.800	285.000
42	USG Wrist Bilateral	195.000	63.000	95.000	353.000
43 44 45 46	DVT (per Regio) : *Ekstrimitas atas kanan/kiri *Ekstrimias bawah kanan/kiri *Karotis	450.000	25.000	225.000	700.000
47	USG Colour Doppler 4 Dimensi	195.000	63.000	143.000	401.000
48	USG Biophysical Profile	195.000	63.000	122.000	380.000
49	USG TVS	195.000	63.000	122.000	380.000
50	USG Doppler Fetal Well being	195.000	63.000	122.000	380.000
51	Fetal Scanning	195.000	63.000	308.000	566.000
52	USG 4D Fetal Imaging	195.000	63.000	458.000	716.000
53	USG Fetal Cardia	195.000	63.000	122.000	380.000

- **Pelayanan Mikrobiologi**

No	Jenis pemeriksaan	Jasa sarana	Jasa pelayanan	Jasa medis spesialis	Tarif
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Pengecatan Gram	36.000	10.000	14.000	60.000
2	Pengecatan BTA	36.000	10.000	14.000	60.000
3	Pengecatan KOH	36.000	10.000	14.000	60.000
4	Pengecatan Lain (India Ink, Neiiseer, LCPB, dan lainnya)	36.000	10.000	14.000	60.000
5	Preparat Basah	36.000	10.000	14.000	60.000
6	Pengambilan sampel Reitz serum Telinga/hidung/lesi	30.000	10.000	10.000	50.000
7	Pengambilan sampel kerokan kulit/kuku	30.000	10.000	10.000	50.000
8	Sampling darah dua sisi	12.000	4.000	4.000	20.000
9	Sampling sederhana lainnya	9.000	3.000	3.000	15.000
10	Kultur darah dan uji kepekaan	550.000	40.000	60.000	650.000
11	Kultur sputum/ETT dan uji kepekaan	550.000	40.000	60.000	650.000
12	Kultur pus/swab dasar luka/jaringan dan uji kepekaan	550.000	40.000	60.000	650.000

13	Kultur Urine dan Uji Kepekaan	550.000	40.000	60.000	650.000
14	Kultur cairan steril lainnya dan uji kepekaan (LCS, Cairan pleura, cairan BAL/Bronchoalveolar Lavage, cairan ascites, cairan CAPD, cairan sendi, cairan pericardium, dan cairan steril lainnya	550.000	40.000	60.000	650.000
15	Kultur swab lainnya dan uji kepekaan (rektal/vagina/cervik/uretra/mata/tenggorok,sekret telinga, dll)	550.000	40.000	60.000	650.000
16	Kultur feses dan uji kepekaan	550.000	40.000	60.000	650.000
17	Skrining MRSA (Swab tenggorok,hidung, dan pelipatan)	550.000	40.000	60.000	650.000
18	Kultur Jamur dan uji kepekaan	550.000	40.000	60.000	650.000
19	Kultur dan uji kepekaan spesimen lainnya	550.000	40.000	60.000	650.000
20	Kultur alat-alat	600.000	80.000	120.000	800.000
21	Kultur Ruangan	900.000	80.000	120.000	1.100.000
22	Interpretasi / Ekspertise hasil kultur oleh Sp.MK	5.000	5.000	40.000	50.000
23	Bakteri control/ATCC	400.000	40.000	60.000	500.000
24	Gene X pert (TCM) TB	14.000	5.000	6.000	25.000
25	Viral load HIV (Gene Xpert)	270.000	80.000	100.000	450.000
26	RT-PCR	160.000	22.000	25.000	207.000

- **Pelayanan Patologi Klinik**

No	Jenis pemeriksaan	Jasa sarana	Jasa pelayanan	Jasa medis spesialis	Tarif
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
A	**Pemeriksaan hematologi**				
1	Darah lengkap (*automated hematology analyzer*)	70.000	15.000	10.000	95.000
2	LED	30.000	15.000	5.000	50.000
3	Jumlah retikulosit	30.000	10.000	15.000	55.000

4	Blood smear (sediaan apus darah tepi)	50.000	10.000	90.000	150.000
5	PT	125.000	15.000	10.000	150.000
6	aPTT	125.000	15.000	10.000	150.000
7	LE cell	50.000	20.000	90.000	140.000
8	Waktu perdarahan (BT)	20.000	15.000	5.000	40.000
9	Waktu bekuan (CT)	25.000	15.000	5.000	45.000
10	Golongan darah ABO + Rhesus (Rh)	35.000	10.000	5.000	50.000
B	**Kimia klinik**				
1	Albumin	40.000	8.000	5.000	53.000
2	Protein total	40.000	8.000	5.000	53.000
3	Asam urat	35.000	8.000	5.000	48.000
4	Bilirubin total	37.000	8.000	5.000	50.000
5	Bilirubin direct	37.000	8.000	5.000	50.000
6	Ureum	37.000	8.000	5.000	50.000
7	Kreatinin	35.000	8.000	5.000	48.000
8	Glukosa sewaktu	27.000	8.000	5.000	40.000
9	Glukosa puasa	27.000	8.000	5.000	40.000
10	Glukosa 2 jam PP	25.000	8.000	5.000	38.000
11	HbA1C	175.000	15.000	10.000	200.000
12	Kolesterol	50.000	8.000	5.000	63.000
13	HDL kolesterol	77.000	8.000	5.000	90.000
14	LDL kolesterol	77.000	8.000	5.000	90.000
15	Trigliserida	47.000	8.000	5.000	60.000
16	SGOT	37.000	8.000	5.000	50.000
17	SGPT	37.000	8.000	5.000	50.000
18	Alkali fosfatase	47.000	8.000	5.000	60.000
19	Gamma GT	57.000	8.000	5.000	70.000
20	Serum iron (SI)	47.000	8.000	5.000	60.000
21	UIBC (Unsaturated Iron Binding Capacity)/TIBC	67.000	8.000	5.000	80.000
22	(Total Iron Binding Capacity)				
23	Elektrolit (Na, K, Cl)	145.000	15.000	10.000	170.000
24	Calsium	145.000	15.000	10.000	170.000

25	D Dimer	425.000	15.000	10.000	450.000
C	**Imunologi dan Serologi**				
1	T4	235.000	25.000	15.000	275.000
2	FT4	350.000	25.000	15.000	390.000
3	Ferritin	300.000	25.000	15.000	340.000
4	TSH	250.000	25.000	15.000	290.000
5	Widal	45.000	15.000	10.000	70.000
6	Dengue Blot (DHF), IgM	275.000	15.000	10.000	300.000
7	+ IgG				
8	NS1	275.000	15.000	10.000	300.000
9	HBsAg (rapid test)	75.000	15.000	10.000	100.000
10	Anti HBs	100.000	15.000	10.000	125.000
11	Anti HAV	300.000	15.000	10.000	325.000
12	HIV	200.000	15.000	10.000	225.000
13	Anti HCV	200.000	15.000	10.000	225.000
14	Anti streptolysin (ASTO)	125.000	15.000	10.000	150.000
15	Rheumatoid factor (RF)	100.000	15.000	10.000	125.000
16	TPHA	125.000	15.000	10.000	150.000
17	VDRL	60.000	15.000	10.000	85.000
18	Beta HCG Darah	255.000	15.000	10.000	280.000
19	FSH	385.000	15.000	10.000	410.000
20	Hs CRP	215.000	15.000	10.000	240.000
21	Troponin I	340.000	15.000	10.000	365.000
22	LH	252.000	15.000	10.000	277.000
23	Antigen SARS Cov-2	12000	10000	5000	27000
24	AGD (analisis gas darah)	255.000	45.000	25.000	325.000
D	**NAPZA**				
1.	Paket Pemeriksaan NAPZA (amfetamin, metamfetamin, cocain, morphine, benzodiazepine, THC, corosiprodol)	240.000	20.000	10.000	270.000

• **Pelayanan Patologi Anatomi**

No	Jenis pemeriksaan	Jasa sarana	Jasa pelayanan	Jasa medis spesialis	Tarif
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
A	Histopatologi				
1.	Kecil	275.000	20.000	80.000	375.000
2.	Sedang	345.000	40.000	140.000	525.000
3.	Besar	475.000	60.000	230.000	765.000
4.	Radikalitas	625.000	75.000	300.000	1.000.000
5.	Frozen Section	1.100.000	80.000	320.000	1.500.000
B	Sitologi				
1.	Papsmear	100.000	10.000	40.000	150.000
2.	LBC	225.000	35.000	140.000	400.000
3.	Sitologi (ex: Ascites Pleura, dll) 1x sample	225.000	35.000	140.000	400.000
4.	Washing	225.000	35.000	1.400.000	400.000
5.	Brushing	225.000	35.000	140.000	400.000
6.	FNAB (tindakan dan diagnose)	425.000	50.000	170.000	650.000

13 Pelayanan penunjang logistik yang terdiri dari:

• **Pelayanan Instalasi Farmasi**

No.	Layanan Farmasi	Tarif
1.	Obat Generik, Obat Non Generik dan obat bebas	Harga Netto Apotek + Pajak Pertambahan Nilai (HNA+PPN) ditambahkan profit margin sebesar 22 %(dua puluh dua persen) dari HNA +PPN
2	Obat Kosmetik khusus	Harga Netto Apotek + Pajak Pertambahan Nilai (HNA+PPN) ditambahkan profit margin sebesar 10 %(sepuluh persen) dari HNA +PPN

3	Obat kanker	Harga Netto Apotek + Pajak Pertambahan Nilai (HNA+PPN) ditambahkan profit margin sebesar 2% (dua persen) dari HNA +PPN
4	Alat kesehatan habis pakai	Harga Netto Apotek + Pajak Pertambahan Nilai (HNA+PPN) ditambahkan profit margin sebesar 15 % (lima belas persen) dari HNA +PPN

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
		%
1.	Layanan Farmasi	50 % dari *profit margin*

- **Pelayanan Instalasi Gizi**

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
		%
1.	Layanan Gizi	50% dari *profit margin*

14 Asuhan Keperawatan

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Asuhan Keperawatan	Tarif
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Total nursing care	6.500	25.000	31.500
2	Partial nursing care	6.500	20.000	26.500
3	Self nursing care	6.500	12.500	19.000

15 Layanan Psikiatri

tarif pelayanan pemeriksaan khusus psikiatri

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik Spesialis	Tarif
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat Keterangan Sehat Jiwa (Tanpa MMPI)	35.000	40.000	60.000	135.000
2	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat Keterangan Sehat Jiwa (Dengan MMPI	50.000	60.000	90.000	200.000
3	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat Keterangan Bebas Narkoba	20.000	10.000	20.000	50.000
4	Psikotherapi Individu	18.000	10.000	25.000	53.000
5	Psikotherapi Keluarga	32.000	10.000	40.000	82.000
6	Visum et Repertum Psikiatrikum	85.000	20.000	230.000	335.000

16 Pelayanan ESWL

No.	Tarif layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jasa Medik Operator	Tarif
			Radiografer	Perawat		
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	ESWL Tanpa Anastesi	2.000.000	220.000	440.000	2.400.000	5.060.000

No.	Jenis Pemeriksaan Radiologi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Jasa Medik Spesialis		Tarif
			Radiographer	Perawat	Penata Anastesi	Operator	Anastesi	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	ESWL dengan Anastesi	2.000.000	220.000	440.000	260.000	2.400.000	960.000	6.280.000

17 Kesehatan Tradisional

No.	Jenis Pemeriksaan Kesehatan Tradisional	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik Spesialis	Tarif
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Akupuntur Ringan	40.000	20.000	40.000	100.000
2	Akupuntur Sedang	60.000	30.000	60.000	150.000
3	Akupuntur Berat	74.000	37.000	74.000	185.000

4	Konsultasi Hypnotherapy	60.000	30.000	60.000	150.000
5	Konsultasi Pranic Healing	30.000	15.000	30.000	50.000
6	Terapi Hypnoterapi 90 maksimal 90 menit	100.000	50.000	100.000	250.000
7	Terapi Pranic Healing	30.000	15.000	30.000	75.000

18. Pengelolaan sampah medis dan limbah cair

No	Kelompok Retribusi	Satuan/Volume	Jangka Waktu	Besaran Tarif (Rp.)
1.	Sampah medis Kering Volume 0-1 kg (dihitung 1 kg)	per Kg	per sekali angkut	35.000
2.	Sampah medis Basah Volume 0-1 kg (dihitung 1 kg)	per Kg	per sekali angkut	35.000
3.	Limbah cair Volume 0-1 m3 (dihitung 1 kg)	per Kg	per sekali angkut	50.000
4.	Biaya Penitipan Sampah Medis Volume sampah (Sampah Padat) max 2x 24 jam (0-1 Kg di hitung 1 kilogram)	per Kg	per hari	5.000

NB

1 Tarif pelayanan kesehatan bagi warga negara asing (WNA) adalah 200% (Dua ratus persen) dari tarif yang berlaku umum, kecuali pasien dengan diagnose HIV/AIDS tarifnya 300% dari tarif yang berlaku umum.

II. PELAYANAN KEBERSIHAN

No	Kelompok Retribusi	Satuan/ Volume	Jangka Waktu	Besaran Tarif (Rp.)
A	**Retribusi Pelayanan Kebersihan**			
1	Rumah Kediaman	Paket	per bulan	10.000,00
2	Kesatrian/Asrama/Pondokan			
	Gol I	Paket	per bulan	25.000,00
	Gol II	Paket	per bulan	15.000,00
3	Hotel			
	Gol I	Paket	per bulan	1.500.000,00
	Gol II	Paket	per bulan	180.000,00
	Gol III	Paket	per bulan	150.000,00
	Gol IV	Paket	per bulan	120.000,00
	Gol V	Paket	per bulan	95.000,00
	Gol VI	Paket	per bulan	75.000,00
	Gol VII	Paket	per bulan	50.000,00
	Gol VIII	Paket	per bulan	45.000,00
4	Rumah Makan			
	Gol I	Paket	per bulan	45.000,00
	Gol II	Paket	per bulan	37.500,00
	Gol III	Paket	per bulan	30.000,00
5	Rumah Sakit			
	Gol I	Paket	per bulan	1.500.000,00
	Gol II	Paket	per bulan	750.000,00
6	Klinik	Paket	per bulan	45.000,00
7	Klinik Bersalin	Paket	per bulan	55.000,00
8	Puskesmas			
	Puskesmas Pembantu	Paket	per bulan	45.000,00
	UPTD Kesehatan/ Puskesmas Rawat Jalan	Paket	per bulan	50.000,00
	UPTD Kesehatan/ Puskesmas Rawat Inap	Paket	per bulan	150.000,00
9	Rumah Praktek Dokter	Paket	per bulan	45.000,00
10	Rumah Praktek Bidan	Paket	per bulan	30.000,00
11	Laboratorium	Paket	per bulan	45.000,00
12	Apotek	Paket	per bulan	50.000,00
13	Toko Obat	Paket	per bulan	45.000,00
14	Gudang			
	Gol I	Paket	per bulan	75.000,00
	Gol II	Paket	per bulan	45.000,00
15	Depo Minyak	Paket	per bulan	8.000.000,00
16	Kantor Pemerintah	Paket	per bulan	45.000,00
17	Kantor Swasta Komersial			
	Gol I	Paket	per bulan	8.000.000,00
	Gol II	Paket	per bulan	750.000,00
18	Tempat Rekreasi	Paket	per bulan	300.000,00
19	Tempat Pendidikan			
	Taman Kanak-kanak/ Playgroup	Paket	per bulan	10.000,00
	Sekolah Dasar	Paket	per bulan	10.000,00
	SLTP/SLTA/Akademi atau PT, Kursus/Bimbingan Belajar	Paket	per bulan	20.000,00
20	Toko - Toko dilingkungan perdagangan/Pusat Kota			
	Gol I	Paket	per bulan	750.000,00
	Gol II	Paket	per bulan	300.000,00
	Gol III	Paket	per bulan	50.000,00
21	Toko-Toko dilingkungan pemukiman dan Warung Pinggir Jalan			
	Toko	Paket	per bulan	15.000,00

	Warung	Paket	per bulan	10.000,00
22	Usaha Lain			
	- Salon Kecantikan			
	Gol I	Paket	per bulan	20.000,00
	Gol II	Paket	per bulan	10.000,00
	-Bilyard	Paket	per bulan	15.000,00
	-Laundry	Paket	per bulan	15.000,00
	-Tempat Potong Rambut	Paket	per bulan	15.000,00
23	Gedung Olahraga/Gedung Kesenian/Gedung pertemuan	Paket	per bulan	75.000,00
24	Bengkel/Reparasi			
	Gol I	Paket	per bulan	60.000,00
	Gol II	Paket	per bulan	30.000,00
25	Tempat Pemandian Kendaraan	Paket	per bulan	45.000,00
26	Usaha Pertukangan			
	Gol I	Paket	per bulan	70.000,00
	Gol II	Paket	per bulan	50.000,00
27	Pabrik/Industri/RMU			
	Gol I	Paket	per bulan	150.000,00
	Gol II	Paket	per bulan	120.000,00
	Gol III	Paket	per bulan	90.000,00
	Gol IV	Paket	per bulan	60.000,00
28	Kios/Los	Paket	per bulan	10.000,00
29	Catering	Paket	per bulan	50.000,00
30	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	Paket	per bulan	100.000,00
31	Pedagang Kaki Lima (PKL)	Paket	per hari	3.000,00
32	Pedagang Musiman	Paket	Per hari	2.000,00
33	Penyelenggaraan Hiburan/Keramaian			
	1. Bersifat Insidentil dan komersial			
	Pertunjukan Besar	Paket	Per Pertunjukan	750.000,00
	Pertunjukan Kecil	Paket	Per Pertunjukan	300.000,00
	2. Bersifat Sosial	Paket	Per Pertunjukan	75.000,00
34	Pembuangan material bongkaran bangunan penebangan pohon dan bongkaran sampah bekas upacara	m3	per hari	50.000,00

Keterangan Penggolongan dalam penetapan tarif :

1 Kesatrian/Asrama/Pondokan:
- Gol I : penghuninya diatas 50 orang
- Gol II : penghuninya dibawah 50 orang

2 Hotel
- Gol I : Berbintang V
- Gol II : Berbintang IV
- Gol III : Berbintang III
- Gol IV : Berbintang II
- Gol V : Berbintang I
- Gol VI : Melati III
- Gol VII : Melati II
- Gol VIII : Melati I

3 Rumah Makan
- Gol I : tempat duduknya di atas 100 orang
- Gol II : kapasitas tempat duduknya di bawah 50 orang
- Gol III : warung nasi

4 Rumah Sakit
- Gol I : rumah sakit swasta
- Gol II : rumah sakit pemerintah

5 Gudang
Gol I : tempat bangunannya tersendiri dan terpisah dari kegiatan
Gol II : tempat bangunannya tersendiri dan terpisah dari kegiatan

6 Kantor Swasta Komersial
Gol I : pelabuhan laut
Gol II : Bank

7 Toko-Toko dilingkungan perdagangan/Pusat Kota
Gol I : swalayan atau toko serba ada
Gol II : Minimarket
Gol III : toko yang bergabung atau berdampingan dengan pusat perbelanjaan atau di pusat kota

8 Salon Kecantikan
Gol I : kapasitas tempat duduk 5 orang keatas atau berada dalam
Gol II : kapasitas tempat duduk dibawah 5 orang atau berada

9 Bengkel/Reparasi
Gol I : usaha besar dan/atau menengah
Gol II : usaha kecil

10 Usaha Pertukangan
Gol I : usaha besar
Gol II : usaha kecil

11 Pabrik/Industri/RMU
Gol I : luas bangunan sampai 5.000 m2
Gol II : luas bangunan sampai 2.500 m2
Gol III : luas bangunan sampai 1.000 m2
Gol IV : industri rumah tangga

12 Penyelenggaraan Hiburan/Keramaian
Bersifat Insidentil dan Komersial :
a. Pertunjukan Besar : Pertunjukan yang diselenggarakan di ruangan terbuka
b. Pertunjukan Kecil : pertunjukan yang diselenggarakan di dalam ruangan
Bersifat Sosial dalam sekali : pertunjukan hiburan yang diselenggarakan oleh pihak swasta

B Retribusi Pelayanan Kebersihan (Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus)

1 Pelayanan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan

No	Pelayanan	Volume Limbah dan Jarak Lokasi	Besaran Tarif (Rp.)
1	Penyedotan	1 m^3 s/d 2 m^3	105.000,00
		diatas 2 m^3 s/d 4 m^3	175.000,00
		diatas 4 m^3 s/d 6 m^3	250.000,00
		diatas 6 m^3	300.000,00
2	Pengangkutan dari lokasi penyedotan ke lokasi pembuangan	0 km s/d 10 km	60.000,00
		diatas 10 km s/d 20 km	95.000,00
		diatas 20 km s/d 30 km	125.000,00
		diatas 30 km s/d 40 km	145.000,00
		diatas 40 km s/d 50 km	160.000,00
		diatas 50 km	175.000,00

2 Kapasitas selang penyedotan lebih dari 10 m, kelebihannya dihitung tarifnya sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per meter

3 Penyediaan tempat pembuangan limbah yaitu masyarakat dapat memanfaatkan tempat pembuangan yang disiapkan untuk membuang limbah kakus dengan dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali pembuangan.

III. PELAYANAN PASAR

A. Pasar Umum

No	Jenis Layanan	Satuan	Jangka Waktu	Besaran Tarif (Rp.)
1	**Pasar Amlapura Timur**			
	Lantai I			
	Kios	Unit	per hari	15.000,00
	Lantai II			
	Kios	Unit	per hari	14.000,00
	Los	Unit	per hari	4.000,00
	Pelataran (tenda, hamparan/dasaran/jongko)	Unit	per hari	3.000,00
2	**Pasar Amlapura Barat**			
	Kios	Unit	per hari	7.000,00
	Los	Unit	per hari	4.000,00
	Pelataran (tenda, hamparan, dasaran, jungku)	Unit	per hari	3.000,00
3	**Pasar Subagan**			
	Kios	Unit	per hari	12.000,00
	Los	Unit	per hari	4.000,00
	Pelataran (tenda, hamparan, dasaran, jungku)	Unit	per hari	3.000,00
4	**Pasar di Luar Kota Amlapura**			
	Toko	Unit	per hari	6.000,00
	Kios	Unit	per hari	5.000,00
	Los	Unit	per hari	3.000,00
	Pelataran (tenda, hamparan, dasaran, jungku)	Unit	per hari	2.000,00
5	**Pasar Umum Rubaya**			
	Kios	Unit	per hari	10.000,00
	Los	Unit	per hari	3.000,00
	Pelataran (tenda, hamparan, dasaran, jungku)	Unit	per hari	2.000,00

B. Pasar Hewan

No	Jenis Hewan	Klasifikasi Hewan/ Ternak	Volume	Besaran Tarif (Rp.)	Jangka Waktu
1	Sapi, Kerbau dan Kuda	Dewasa	per ekor	7.000,00	/Hari
		Bibit/anak	per ekor	4.000,00	/Hari
2	Kambing	Dewasa	per ekor	4.000,00	/Hari
		Bibit/anak	per ekor	2.000,00	/Hari
3	Babi	Dewasa	per ekor	3.000,00	/Hari
		Bibit/anak	per ekor	2.000,00	/Hari
4	Unggas (ayam, itik, entog, burung)	Dewasa, Bibit/anak	Keranjang (1 s/d 10 ekor)	3.000,00	/Hari
		Dewasa, Bibit/anak	Keranjang (11 s/d 20 ekor)	4.000,00	/Hari
		Dewasa, Bibit/anak	Keranjang (20 s/d 30 ekor)	5.000,00	/Hari
		Dewasa, Bibit/anak	Keranjang (diatas 30 ekor)	6.000,00	/Hari

IV. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Jangka Waktu	Besaran Tarif (Rp.)
1	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan Sejenisnya	Unit	Sekali Parkir	3.000,00
2	Bus dan Truck	Unit	Sekali Parkir	5.000,00
3	Sepeda Motor	Unit	Sekali Parkir	1.000,00

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA

I. PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

No	Jenis Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	Satuan	Jangka Waktu	Besaran Tarif (Rp.)
1	Penggunaan Bangunan Kantin			
	Di Areal/lingkungan RSUD Karangasem			
	1 Kantin (termasuk listrik dan air)	Unit	Perbulan	300.000,00
	2 Lahan Untuk kantin	m2	Perbulan	25.000,00
	Di Areal/lingkungan Puskesmas			
	1 Kantin (termasuk listrik dan air)	Unit	Perbulan	300.000,00
	2 Lahan Untuk kantin	m2	Perbulan	25.000,00
	Di Areal GOR Gunung Agung			
	1 Kantin (termasuk listrik dan air)	Unit	perbulan	300.000,00
	Di lingkup Disdikpora, Sekolah PAUD / TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri			
	1 Lahan untuk kantin	m2	Perbulan	25.000,00
	Di Lingkungan Perangkat Daerah			
	1 Lahan untuk kantin	m2	perbulan	25.000,00
	Di Lingkungan Kantor Setda Kab. Karangasem	Unit	Perbulan	150.000,00
	Di Lingkungan Kantor Setda Kab. Karangasem (Kelas I)	Unit	Perbulan	300.000,00
2	Pemakaian Aula/Wantilan Kantor	Unit	Perhari	500.000,00
3	Sewa warung/toko/ kios/sejenisnya			
	1. di dalam kota	m^2	Perbulan	17.500,00
	2. di luar kota	m^2	Perbulan	10.000,00
4	Toko/Kios di lingkungan Setda Kab. Karangasem	Unit	Perbulan	600.000,00
5	Toko di Wilayah Kabupaten Karangasem (Dalam Kota)	m^2	per bulan	17.500,00

II. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	JENIS KENDARAAN	SATUAN	JANGKA WAKTU	BESARAN TARIF (Rp.)
1.	Bus Cepat/Tronton	Unit	Sekali Parkir	15.000,00
2.	Bus/Truck dan sejenisnya	Unit	Sekali Parkir	10.000,00
3.	Sedan/Jeep/Microlet/ Pick Up dan Sejenisnya	Unit	Sekali Parkir	5.000,00
4.	Mobil Box	Unit	Sekali Parkir	5.000,00
5.	Sepeda Motor	Unit	Sekali Parkir	2.000,00

III. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

JENIS PELAYANAN	SATUAN	JANGKA WAKTU	BESARAN TARIF (Rp.)
Pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak jenis ternak sapi/kerbau meliputi penyediaan fasilitas pemotongan termasuk pelayanan Pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dipotong (*Ante Mortem*) dan sesudah dipotong (*Post Mortem*)	ekor	per hari	20.000,00

IV. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

No	Jenis Fasilitas Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	Satuan	Jangka Waktu	Besaran Tarif (Rp.)
1	**Gelanggang Olah Raga Gunung Agung Amlapura**			
a.	Untuk Pertandingan / Kegiatan Olah Raga di Gedung GOR Gunung Agung Amlapura			
	1 Pemakaian Siang Hari (06.00 – 18.00 Wita)			
	- Komersial	Unit	Perhari	1.500.000,00
	- Komersial	Unit	Perjam	150.000,00
	- Non Komersial	Unit	Per tiga jam	300.000,00
	2 Pemakaian Malam Hari (18.00 – 22.00 Wita)			
	- Komersial	Unit	Perhari	2.500.000,00
	- Komersial	Unit	Perjam	200.000,00
	- Non Komersial	Unit	Per tiga jam	300.000,00
	3 Overtime / perpanjangan waktu	Unit	Perjam	50.000,00
	Belum termasuk jasa kebersihan			
b.	Penggunaan Lapangan Tenis			
	1 Pemakaian Siang Hari (06.00 – 18.00 Wita)			
	- Komersial	Unit	Per tiga jam	500.000,00
	- Non Komersial	Unit	Per tiga jam	200.000,00
	2 Pemakaian Malam Hari (18.00 – 22.00 Wita)		Per tiga jam	
	- Komersial	Unit	Per tiga jam	700.000,00
	- Non Komersial	Unit	Per tiga jam	300.000,00
	3 Overtime / perpanjangan waktu	Unit	Perjam	50.000,00
	Belum termasuk jasa kebersihan			
c.	Penggunaan Panjat Tebing			
	1 Pemakaian Siang Hari (06.00 – 18.00 Wita)			
	- Komersial	Unit	Perhari	500.000,00
	- Non Komersial	Unit	Per tiga jam	200.000,00
	2 Pemakaian Malam Hari (18.00 – 22.00 Wita)			
	- Komersial	Unit	Perhari	750.000,00
	- Non Komersial	Unit	Per tiga jam	300.000,00
	3 Overtime / perpanjangan waktu	Unit	Perjam	50.000,00
	Belum termasuk jasa kebersihan			
d.	Penggunaan untuk keperluan pertunjukan / hiburan musik band, dll yang dikomersilkan	Unit	Perhari	1.000.000,00
	Belum termasuk jasa kebersihan			

2	**Penggunaan Lapangan Yowana Wijaya Amlapura**			
	- Komersial	Unit	Perhari	1.000.000,00
	- Non Komersial	Unit	Perhari	500.000,00
	**Belum termasuk jasa kebersihan*			
3	**Penggunaan Kolam Renang GOR Gunung Agung Amlapura**			
	- Tarif masuk anak – anak usia 3 - 12 tahun	Orang	Perhari	2.000,00
	- Tarif masuk dewasa	Orang	Perhari	5.000,00
	- Untuk pertandingan	Unit	Perhari	500.000,00
	**Belum termasuk jasa kebersihan*			
4	**Penggunaan Stadion I Gusti Ketut Jelantik**			
	A. Kegiatan pertandingan / kegiatan olahraga sepakbola dalam pemakaian per hari (06.00 - 18.00 wita)			
	- Komersial	Unit	Per pemakaian	1.000.000,00
	- Non Komersial	Unit	Per pemakaian	500.000,00
	B. Kegiatan pertandingan / kegiatan olahraga sepakbola dalam pemakaian per jam (06.00 - 18.00 wita)			
	- Komersial	Unit	Per pemakaian	200.000,00
	- Non Komersial	Unit	Per pemakaian	100.000,00
	**Belum termasuk jasa kebersihan*			

V PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

A. Jenis Bibit Perikanan

No	Jenis Bibit Ikan	Ukuran	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Nila	1-3 cm	ekor	50,00	
		4-5 cm	ekor	150,00	
		6-8 cm	ekor	300,00	
		9-12 cm	ekor	500,00	
2	Gurami	1-3 cm	ekor	800,00	
		4-5 cm	ekor	1.200,00	
		6-8 cm	ekor	5.000,00	
3	Mas/Karper	1-3 cm	ekor	100,00	
		4-5 cm	ekor	200,00	
		6-8 cm	ekor	500,00	
		9-12 cm	ekor	1.000,00	
4	Lele	4-5 cm	ekor	150,00	
		6-8 cm	ekor	300,00	
		9-12 cm	ekor	600,00	

B. Bibit Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan

No	Jenis Tanaman	Satuan	Spesifikasi	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Hortikultura				
	Bibit Salak Gula Pasir	pohon	daun 5-6	12.500,00	Perpohon Bersertifikat
	Bibit Pepaya Kalina	pohon	ketinggian 30 ring atau lebih dari 30 cm	4.000,00	Belum Bersertifikat
2.	Tanaman Pangan				
	Bibit Kacang Tanah	Kilogram	Polong kering, siap tanam	35.000,00	Polong kering, siap tanam
3.	Perkebunan				
	Kelapa Genjah Bali	pohon	daun 4-6	20.000,00	Perpohon bersetifikat dengan polibeg

C. Ikan Konsumsi/Induk Ikan yang sudah tidak produktif

No	Jenis ikan	satuan	spesifikasi	Tarif/harga (Rp.)	Keterangan
1	Nila	Kg	-	27.000,00	
2	Gurami	Kg	-	50.000,00	
3	Mas/Karper	Kg	-	40.000,00	
4	Lele	Kg	-	22.000,00	

VI. PEMANFAATAN ASET DAERAH

No	Jenis Aset Daerah yang digunakan	Satuan	Jangka Waktu	Besaran Tarif (Rp.)
1	Ball Room Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional (kecuali digunakan oleh Perangkat Daerah)	Unit	Perhari	9.500.000,00
2	Excavator PC 200	Unit	Per Jam	225.000,00
3	Wales 8 ton	Unit	Perhari	250.000,00
4	Wales 4-6 ton	Unit	Perhari	225.000,00
5	Wales 2,5 ton	Unit	Perhari	150.000,00
6	Wales Kecil/Baby	Unit	Perhari	150.000,00
7	Wheel Loader	Unit	Per Jam	225.000,00
8	Stamper Kodok	Unit	Perhari	100.000,00
9	Dump Truck	Unit	Perhari	125.000,00
10	Truck Crane	Unit	Perhari	200.000,00
11	Compresor	Unit	Perhari	150.000,00
12	Flatbed Truck	Unit	Perhari	125.000,00
	Mini Excavator	Unit	Per Jam	125.000,00
	Truck Self Loader/Truck Pengangkut Alat Berat	Unit	Per Angkut	400.000,00
13	Timbangan Ternak	Unit	Perhari	2.000,00
14	Rumah Dinas (Rumah Negara Gol. III)			
	1 type C	70-150 M^2	Perbulan	300.000,00
	2 type D	45-69 M^2	Perbulan	125.000,00
	3 type E	≤ 44 M^2	Perbulan	100.000,00
15	Penggunaan Tanah Lapangan disebelah Timur Stadion I Gusti Ketut Jelantik			
	1 Untuk keperluan rapat-rapat dan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh partai politik dan organisasi massa	Unit	Perhari	500.000,00
	2 Komersial	Unit	perhari	2.500.000,00
	3 Non Komersil	Unit	Perhari	300.000,00
	*Belum termasuk jasa kebersihan			

16	Penggunaan Aula pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga				
	1	Gedung Aula Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga kapasitas 100 orang	Unit	Sekali Pertemuan	700.000,00
	2	Ruang Aula SKB (Kapasitasi 50-60 orang)	Unit	Sekali Pertemuan	350.000,00
	3	Ruang Aula SMPN 5 Amlapura (Kapasitasi 60-70 orang)	Unit	Sekali Pertemuan	350.000,00
	*Belum termasuk jasa kebersihan				
17	Sewa Ruang Rapat Puskesmas				
	1	Ruang Rapat A (Kapasitasi 15-30 orang)	Unit	Sekali Pertemuan	350.000,00
	2	Ruang Rapat B (> 30 orang)	Unit	Sekali Pertemuan	700.000,00
18	Sewa Ruang Rapat RSUD Kabupaten Karangasem				
	1	Ruang Rapat A	Unit	Sekali Pertemuan	350.000,00
	2	Ruang Rapat B	Unit	Sekali Pertemuan	700.000,00

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan HSBGN Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp.6.740.000,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

B. Besaran Indeks
1. Bangunan Gedung
Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (Llt) dikalikan Indeks Lokalitas (llo) dikalikan Standar Harga Satuan tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (lt) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg) atau dengan rumus:

Llt x (llo x SHST) x lt x Llbg

2. Prasarana Bangunan Gedung
Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalika Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangunan (lbg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

V x I x lbg x HSpbg

Tabel Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp. 9.000,- /m¹	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Tanggul/Retaining wall	Rp. 10.000,- /m¹	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Turap batas kaveling/ Persil	Rp. 10.000,- /m¹	1,00	0,65x50%	0,45x50%
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 100.000,- /m tinggi	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Gerbang	Rp. 200.000,- /m tinggi	1,00	0,65x50%	0,45x50%
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 14.000,- /m²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Lapangan upacara	Rp. 2.200,- /m²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Lapangan olahraga Terbuka	Rp. 2.200,- /m²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp.2.500,-/m²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp.9.000,-/m²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 95.000,- /m²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Boxculvert	Rp. 65.000,- /m²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 95.000,- /m²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		Rp. 95.000,-/m²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		Rp. 95.000,- /m²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
10	Konstruksi kolam/ Reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp. 75.000,- /m²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Kolam pengolahan air Reservoir dibawah tanah	Rp. 20.000,- /m²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
11	Konstruksi		Rp. 20.000,- /m²			

	septictank, sumur resapan			1,00	0,65x50%	0,45x50%
12.	Pekerjaan Drainase Dalam Persil	1) Saluran	Rp.5.000,- /m^2	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		2) Kolam Tampung	Rp. 20.000,-/m^2	1,00	0,65x50%	0,45x50%
13.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp. 250.000,-/5m^2	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Cerobong	Rp.175.000,-/5m^2	1,00	0,65x50%	0,45x50%
14.	Konstruksi Menara Air		Rp. 250.000,-/5m^2	1,00	0,65x50%	0,45x50%
15.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 60.000,- /m2	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Patung	Rp. 90.000,- /m2	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Di dalam persil	Rp. 250.000,-/unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Di luar persil	Rp.500.000,-/unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
16.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp.700.000,- /unit (luas maksimum 10 m2 apabila ada penambah an luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp100.000,-/m2	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Instalasi telepon / komunikasi	Rp950.000,- / unit (luas maksimum 10 m2 apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.125.000,-/m2	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Instalasi Pengolahan	Rp.700.000,- / unit (luas maksimum 10 m2 apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.100.000,-/m2	1,00	0,65x50%	0,45x50%
17	Konstruksi reklame / papan nama	*Billboard* papan iklan	Rp.50.000,- / Unit dan penambahannya	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa Tembok pagar)	Rp. 40.000,- /Unit dan penambahanya	1,00	0,65x50%	0,45x50%
18	Fondasi mesin(diluar bangunan)		Rp. 50.000,- /Unit mesin	1,00	0,65x50%	0,45x50%
19	Konstruksi menara televisi		Rp.4.125.000,-/ unit tinggi maksimal 100m, selebihnya dihitung kelipatan	1,00	0,65x50%	0,45x50%
20	Konstruksi menara telekomunikasi	Menara Bersama				
		a. Ketinggian kurang dari 25m	Rp. 1.375.000,- / unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%

		b. Ketinggian 25-50m	Rp. 2.750.000,- / unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		c. Ketinggian diatas 50m	Rp. 4.125.000,- / unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Menara mandiri				
		a. Ketinggian kurang dari 25m	Rp2.750.000,- / unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		b. Ketinggian 25-50m	Rp.5.500.000,- / unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		c. Ketinggian diatas 50m	Rp.8.250.000,- / unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
21	Konstruksi antena radio			1,00	0,65x50%	0,45x50%
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki: *Berlaku kelipatan Rp. 250.000 setiap penambahan ketinggian setinggi 25m)	Ketinggian 25-50m	Rp.687.500,- / unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 51-75m	Rp.1.375.000,- / unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 76-100m	Rp.2.062.500,- / unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 101-125m	Rp.4.125.000,- / unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 126-150m	Rp.8.250.000,- / unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian di atas 150m	Rp.16.500.000,- / unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
	2) Sistem Guy Wire (bentang kawat) *berlaku kelipatan Rp. 100.000 setiap penambahan ketinggian setinggi 100m)	Ketinggian 0-50m	Rp. 687.500,- / unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 51-75m	Rp. 1.375.000,- / unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 76-100m	Rp. 2.062.500,- / unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian di atas 100m	Rp. 4.125.000,- / unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
22	Tangki Tanam Bahan Bakar		Rp. 1.325.000,-/ unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
23	Konstruksi Penyimpanan Silo		Rp. 1.325.000,-/ unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%

3. Indeks Terintegrasi

Indek terintegrasi sebagaimana dimaksud pada huruf D dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

a. Indeks Terintegrasi

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak	1 2

				sederhana	
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100 m² dan< 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. > 100 m² dan> 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	01
Ganda / Campuran a. Luas 500 m² dan >2	0,6				
b. Luas >500 m² dan >2 lantai	0,8				

b. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi Bangunan Gedung a. Sedang b. Berat	 0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama	 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 0,35 x 50% = 0,150

c. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien JumlahLantai
Basemen 3 lapis +(n)	1,393+0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236

8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,696
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801

47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai / lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada Bangunan Gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Untuk perhitungan Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung yang terdiri dari beberapa lantai dan lapis basemen, menggunakan rumus:

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)+\sum(LBi \times KB))}{(\sum LLi+\sum LBl)}$$

Keterangan:

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

Lbi : Luas Basemen ke-i

Kbi : Koefisien Jumlah lapis

4. Indeks Lokalitas

Indeks Lokalitas yang digunakan dalam perhitungan Retribusi Bangunan Gedung ditetapkan senilai 0,5% (nol koma lima persen).

Tabel Indeks Lokalitas

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,4	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,4	0,4
Usaha	Mikro	0.4	0.4	0.4	0.3
	Non Mikro	0.5	0.5	0.5	0.5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

Contoh penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung:

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,33	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	:	Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	:	1 Lantai
		∑ (bp x Ip) = 1,2	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegritas (It): 0,33 x 1,2 x 1 = 0,4					

2. Fungsi Keagamaan

Bangunan gedung keagamaan tidak dipungut retribusi.

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter		
Usaha	1	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	:	Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,265= 0,6325	Ketinggian	:	8 Lantai
		∑ (bp x Ip) = 1,6325	Kepemilikan	:	Badan Usaha
Fungsi	Indeks	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegritas (It): 1 x 1,6325 x 1 = 1,6325					

Studi kasus Gedung Restoran baru Kota X

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Lth)	:	738 m^2
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	Pribadi
SHSTBG Sederhana	:	Rp. 5.170.000,-
Indeks Lokalitas	:	Nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter		
Usaha	0,7	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	:	Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	:	3 Lantai
		∑ (bp x Ip) = 1,56	Kepemilikan	:	Badan Usaha
Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegritas (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1.092					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (Llt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	738 x (0,5% x Rp. 5.170.000) x 1,092 x 1
	:	Rp. 20.832.411,00

II. RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

a. Besaran Tarif Retribusi PTKA sebesar USD 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan, per orang dan per bulan yang dibayarkan dengan satuan mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah serta dibayarkan di muka ke kas Daerah saat pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi.

b. Tarif Retribusi Pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan, yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi Pelayanan PTKA oleh Wajib Retribusi Pelayanan PTKA.

c. Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi Pelayanan PTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA